

18

**SOPPING PADA MASA PEMERINTAHAN HAJI ANDI MADE ALIE
(1965 - 1979)**



PERPUSTAKAAN PUSAT UNIV. HASANUDDIN

Tgl. terima	20-4-1998
Asal dari	FAK. SASTRA
banyaknya	2/DUA/ERS
Harga	HADIAH
No. Inventaris	980402192.
No. Kms	

S K R I P S I

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian
guna memperoleh gelar Sarjana Sastra
pada Fakultas Sastra
Universitas Hasanuddin

G L E N

M U R S A L I N
Nomor Pokok ; 91 07 022

UJUNG PANDANG

1997

Dipersembahkan
kepada kedua orang tua tercinta
Ayahanda Saleng Umar
Ibunda Siara Side

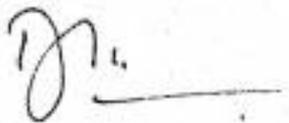
UNIVERSITAS HASANUDDIN

FAKULTAS SASTRA

Sesuai dengan Surat Penugasan Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin Nomor 674/J04.10.1/PP.27/1997 tanggal 17 Maret 1997, dengan ini kami menyatakan menerima dan menyetujui skripsi ini.

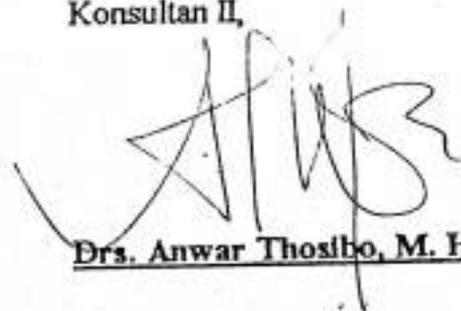
Ujung Pandang, 23 Agustus 1997

Konsultan I,



Drs. Daud Limbugau, SU.

Konsultan II,



Drs. Anwar Thosho, M. Hum.

Disetujui untuk diteruskan
kepada Panitia Ujian Skripsi
D e k a n

u.b. Ketua Jurusan Sejarah,




Drs. Suriadi Mappangara, M. Hum.

UNIVERSITAS HASANUDDIN
FAKULTAS SASTRA

Pada hari ini, Senin tanggal 1 September 1997, Panitia Ujian Skripsi menerima dengan baik skripsi yang berjudul : SOPPENG PADA MASA PEMERINTAHAN HAJI ANDI MADE ALIE (1965-1979)

yang diajukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin.

Ujung Pandang, September 1997

Panitia Ujian Skripsi :

1. Drs. Suriadi Mappangara, M. Hum.
2. Drs. Bambang S, M.S.
3. Prof. Dra. Marrang P, M.S.
4. Drs. Abdul Latief, M. Hum.
5. Drs. Daud Limbugau, S.U.
6. Drs. Anwar Thosibo, M.Hum.

Ketua

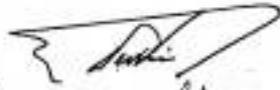
Sekretaris

Penguji I

Penguji II

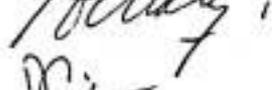
Konsultan I

Konsultan II

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena taufik dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. Penulisan skripsi ini adalah upaya penulis memenuhi salah satu syarat ujian akhir guna memperoleh gelar Sarjana Sastra pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin. Ada berbagai rintangan dan hambatan yang penulis hadapi dalam upaya perampungan tugas ini, tetapi melalui ketekunan dan kerja keras yang disertai doa kepada Tuhan Yang Maha Pengasih, akhirnya penulisan skripsi ini dapat juga selesai pada waktunya.

Penulis menyadari adanya berbagai kekurangan yang terdapat dalam skripsi ini sebagai akibat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis senantiasa membuka diri untuk menerima koreksi atau kritik yang konstruktif dari berbagai pihak dalam upaya penyempurnaan skripsi yang sangat sederhana ini. Koreksi atau kritik tersebut tidak saja berguna untuk memperbaiki karya penulis, tetapi juga berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan yang penulis geluti selama ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, Penulis telah mendapat bantuan, dorongan semangat dan bimbingan dari berbagai pihak yang sangat penulis hormati. Selayaknya pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada :

- 1) Prof. Dr. H. Nadjamuddin, M.Sc. (almarhum), selaku Guru Besar Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin;
- 2) Drs. Mustafa Makka, MS. selaku Dekan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin;
- 3) Drs. Suriadi Mappangara, M.Hum, selaku Ketua Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin;
- 4) Drs. Daud Limbugau, SU. dan Drs. Anwar Thosibo, M.Hum. selaku konsultan I dan II, yang telah meluangkan waktunya memberikan bimbingan arahan sehingga skripsi ini dapat penulis rampungkan;
- 5) Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian;
- 6) Bapak H. Abu Bakar Kadir, BA dan Drs.T Hamaluddin yang telah memberikan keterangan yang sangat berarti kepada penulis;
- 7) Bapak dan Ibu Dosen yang telah membimbing penulis menekuni berbagai mata kuliah dari awal hingga akhir studi di Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin;
- 8) Karyawan Fakultas Sastra Universitas Hasanuddin yang telah melayani penulis dengan baik;
- 9) Kedua orang tua tercinta dan segenap keluarga yang mengasuh, membimbing dan berdoa demi tercapainya cita-cita penulis;
- 10) Kakak Farida, adik Sri Rahayu, Hamriani, rekan-rekan mahasiswa dan warga Asrama Tawakkal serta

semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan namanya satu persatu, yang telah memberikan bantuan yang tulus kepada penulis selama ini.

Semoga segala bantuan yang penulis terima dari berbagai pihak tersebut mendapat balasan dari Tuhan Yang Maha Pengasih. Semoga pula karya ini dapat diterima sebagai sumbangan pikiran penulis yang ada nilainya bagi pembangunan bangsa Indonesia, khususnya pada aspek pembinaan dan pelestarian nilai-nilai sejarah di Republik Indonesia yang kita cintai bersama. Amin.

Ujung Pandang, Agustus 1997

Penulis

DAFTAR ISI



	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PENERIMAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Alasan Memilih Judul	1
B. Masalah dan Batasan Masalah	4
C. Metodologi	6
BAB II. GAMBARAN UMUM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOPPENG	11
A. Keadaan Geografis	11
B. Keadaan Sosial Budaya	13
C. Lintasan Sejarah Soppeng	18
BAB III. TERBENTUKNYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOPPENG	25
A. Awal Terbentuknya	25
B. Bupati Yang Pernah Memerintah	30
C. Hasil Yang Telah Dicapai	32

BAB	IV SOPPENG PADA MASA PEMERINTAHAN HAJI ANDI MADE ALIE	37
	A. Haji Andi Made AliE sebagai Bupati Sop- peng yang keempat	37
	B. Keadaan dan kebijaksanaan Pembangunan .	40
	C. Usaha-Usaha yang Dilakukan Dalam Pem- angunan Daerah	45
	1. Bidang Ekonomi	45
	2. Bidang Sosial Budaya	61
	3. Bidang Politik	80
BAB	V. KESIMPULAN	99
	DAFTAR PUSTAKA	103
	LAMPIRAN	106

DAFTAR TABEL

TABEL	Halaman
1. Realisasi Bimas di Kabupaten Soppeng pada Musim Tanam 1970-1979	48
2. Realisasi Inmas di Kabupaten Soppeng pada Musim Tanam 1973-1979	50
3. Tingkat Produktivitas Tanaman Padi (Pangan) di Kabupaten Soppeng Tahun 1966-1978	51
4. Populasi Ternak di Kabupaten Soppeng Tahun 1974-1978	54
5. Perkembangan Jumlah Penabung dan Tabungan di Kabupaten Soppeng Tahun 1974-1979	57
6. Keadaan Jumlah Umat Beragama di Kabupaten Soppeng Tahun 1974-1978	67
7. Keadaan Jumlah Jamaah Haji di Kabupaten Soppeng Tahun 1969-1979	73

A B S T R A K

Perkembangan dan keberhasilan Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng dalam berbagai bidang pembangunan sampai sekarang ini, tentunya berkat langkah dan usaha yang terpadu dan bekesinambungan dari Bupati yang satu ke Bupati yang berikutnya. Sampai sekarang ini, Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng telah memiliki delapan Bupati dan salah satu diantaranya adalah Haji Andi Made AliE. Masa pemerintahannya sangat memberi arti bagi perkembangan Daerah Soppeng dan ia adalah peletak dasar pembangunan di masa Orde Baru.

Dalam mengkaji mengenai perkembangan pembangunan pada masa pemerintahan Haji Andi Made AliE, kami menggunakan pendekatan Ilmu Sosial yang bertujuan untuk mengungkap keadaan serta berbagai usaha dan hasil-hasil pembangunan, dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik. Akhirnya terbukti bahwa Haji Andi Made AliE berhasil membawa Daerah Soppeng ke dalam keadaan yang lebih maju dan lebih mantap dalam perkembangan pembangunannya.

BAB I
PENDAHULUAN

A. Alasan Memilih Judul

Bangsa Indonesia telah melalui perjalanan sejarah yang cukup panjang. Kalau diamati, secara historis dan amat bijaksana, dari awal dengan suatu kesepakatan bahwa perjalanan sejarah bangsa harus dilihat sebagai suatu kerangka konseptual lokal dan nasional. Dengan demikian, bagi para sejarawan harus menjelaskan persoalan atau peristiwa sejarah lokal dan nasional tidak hanya perlu disepakati dan dimengerti sebagai pemikiran teoritis, tetapi secara historis dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Obyek sejarah lokal di Indonesia khususnya di Sulawesi Selatan begitu banyak, sehingga tampaknya tetap akan menjadi obyek menarik dalam penulisan sejarah. Sejarah lokal sangat menarik karena mengungkapkan soal-soal kemanusiaan secara khusus dan menyimpan pola-pola kelakuan tertentu yang merupakan bahan perbandingan dengan daerah lain.¹⁾ Dengan demikian, unsur sejarah suatu

¹⁾ Sartono Kartodirjo, 1993, *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, hal. 74.

daerah akan bermakna karena dapat dihubungkan dengan konteks makro serta dapat dicakup dalam suatu generalisasi. Di dalamnya ada masalah tentang struktur agraris, kekuasaan, pemerintahan, sosial budaya, ekonomi dan lain sebagainya. Kesemuanya akan memberikan gambaran tentang keadaan dan situasi di suatu tempat pada masa yang lampau, yang tentunya akan membuat kita lebih mengerti dan memahami masa kini dan masa yang akan datang.

Dalam buku petunjuk Seminar Sejarah Lokal, antara lain dikatakan bahwa :

"Dengan melakukan penelitian sejarah lokal, kita tidak hanya bisa memperkaya perbendaharaan sejarah nasional tetapi lebih penting lagi memperdalam pengetahuan kita tentang dinamika sosiokultural dari masyarakat Indonesia yang majemuk ini secara lebih intim. Dengan ini, kita makin menyadari pula berbagai corak penghadapan manusia terhadap lingkungannya dan dengan sejarahnya. Selanjutnya, pengenalan yang memperdalam pula kesadaran sejarah kita yaitu kita diberi kemungkinan untuk memperdalam makna dari berbagai peristiwa sejarah yang dilalui" ²⁾

Hal tersebut di atas erat kaitannya dengan pernyataan tentang sejarah dapat memberikan keterangan yang berarti bagi suatu pengenalan diri dan pengenalan masa kini. Hal ini pulalah yang mendasari Herder mengatakan bahwa "Sejarah itu adalah proses ke arah tercapainya kemanusiaan

²⁾ I Gede Widja, 1986, *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*, Bandung, Angkasa, Hal. 17.

yang tertinggi atau *mensenheit*"³⁾

Berkaitan dengan semua pernyataan tersebut, pemilihan obyek kajian sejarah lokal dengan judul "SOPPENG PADA MASA PEMERINTAHAN HAJI ANDI MADE ALIE (1965-1979)" didasarkan pada kenyataan bahwa Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng pada masa tersebut mengalami banyak perubahan atau perkembangan dalam berbagai bidang, baik fisik maupun nonfisik. Sebagaimana kita ketahui bahwa setelah tahun 1965 Indonesia memasuki tahapan baru dalam perjalanannya, di mana pada tahun 1966 merupakan masa awal Orde Baru dan Bangsa Indonesia pada masa awal Orde Baru, berusaha membangun kembali jati diri bangsa dengan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng yang merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, pada masa itu yaitu di bawah pemerintahan Bupati Haji Andi Made AliE, melakukan berbagai langkah dan usaha perbaikan dan pembangunan di segala bidang demi mencapai kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata. Hal tersebut terbukti dengan keberhasilan-keberhasilan pembangunan, utamanya pada Pelita II (1974-1978).

Alasan lain pemilihan judul tersebut adalah bahwa

³⁾ Taufik Abdullah, 1985, *Sejarah Lokal di Indonesia*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hal. 18.

pengungkapan sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng khususnya pada masa pemerintahan Haji Andi Made AliE, belum pernah diangkat dalam suatu tulisan ilmiah. Di samping itu pula, penulis dapat menyumbangkan pemikiran dan gagasan-gagasan bagi kepentingan lokal dan nasional serta memperluas dan memperdalam cakrawala kita mengenai dinamika perkembangan daerah di Sulawesi Selatan, khususnya Kabupaten Daerah TK II Soppeng. Tidak kalah pentingnya pula bahwa pengungkapan masa lampau daerah Soppeng akan membuktikan bahwa masa lampau daerah ini adalah bagian dari masa lampau bangsa Indonesia.

B. Masalah dan Batasan Masalah

Perkembangan suatu daerah sangat ditentukan oleh kondisi fisik maupun nonfisiknya. Dimaksudkan sebagai kondisi fisik di sini adalah letak geografis, potensi wilayah dan penduduknya. Adapun yang dimaksud nonfisik adalah menyangkut aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan. Tidak kalah pentingnya pula bahwa perkembangan suatu daerah sangat dipengaruhi oleh latar belakang historisnya.

Sementara itu, pelaksanaan pembangunan suatu daerah sangat tergantung pada usaha-usaha mendinamiskan masyarakat. Dalam pelaksanaan usaha tersebut, diperlukan pemikiran yang lebih jauh tentang cara membawa masyarakat

untuk berpartisipasi. Berdasarkan itu, maka disadari bahwa keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan pembangunan sangat ditentukan oleh kepemimpinan seorang tokoh. Tidak stabilnya sistem pemerintahan serta tidak dinamisnya kehidupan masyarakat akan menimbulkan ketidakberhasilan pembangunan.

Keberhasilan kepemimpinan Haji Andi Made AliE sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng selama 14 tahun, yaitu dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1979 terbukti dengan adanya perubahan atau perkembangan dalam berbagai bidang pembangunan di Kabupaten Soppeng selama masa pemerintahannya. Tentunya perkembangan tersebut tidak terlepas dari berbagai usaha nyata yang berkesinambungan dalam memanfaatkan atau mendayagunakan segala potensi yang dimiliki daerah Soppeng.

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, kajian sejarah lokal ini berfokus pada perubahan atau perkembangan yang terjadi di Kabupaten Daerah TK. II Soppeng pada masa pemerintahan Haji Andi Made AliE. Keadaan atau perkembangan yang dimaksud adalah dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik. Tulisan ini akan memaparkan keadaan dan berbagai usaha dan langkah nyata yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama masyarakatnya serta hasil-hasil pembangunan yang dicapai Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng selama masa pemerintahan Haji Andi Made AliE.

C. Metodologi

Tujuan penulisan sejarah adalah untuk merenkonstruksi kembali totalitas dari fakta-fakta sejarah dengan tidak mengaburkan masa lampau. Hal ini tentunya tidak mungkin tercapai karena pada hakekatnya masa lampau tidak akan mungkin dapat diketahui sepenuhnya dalam pikiran manusia.⁴⁾ Sementara di sisi lain, penulis sejarah atau pembuat fakta adalah aspek yang tidak terlepas dari sifat kesubjektifannya karena dipengaruhi oleh alam pikiran dan jiwa jamannya. Oleh karena itu, Ilmu Sejarah memberikan tuntunan untuk mendekati kebenaran dan keobyektifan suatu kajian sejarah.

Untuk mendekati kebenaran dan keobyektifan suatu kajian sejarah, maka seorang penulis dituntut untuk berpegang teguh pada Metode Sejarah⁵⁾ dalam mengungkapkan apa yang sesungguhnya telah terjadi. Metode sejarah ini

⁴⁾ Louis Gottschalk, 1986, *Mengerti Sejarah*, Dialihbahasakan oleh Nugroho Notosusanto, Jakarta, Universitas Indonesia Press, hal. 30.

⁵⁾ Metode Sejarah adalah proses untuk mengkaji dan menguji kebenaran rekaman dan peninggalan-peninggalan masa lampau dan menganalisa secara kritis. Istilah metode dalam arti metode sejarah hendaknya diartikan yang lebih luas, tidak hanya pelajaran mengenai analisa kritis saja, melainkan juga meliputi usaha sintesa daripada data yang ada sehingga menjadi penyajian dan kisah sejarah yang dapat dipercaya. Lihat Hugiono dan Purwanto, *Pengantar Ilmu Sejarah* (Jakarta : Rineka Cipta, 1992), hal. 25. Bandingkan pula dengan Louis Gottschalk, *OP. Cit*, hal. 32.

meliputi pencarian sumber (heuristik), kritik sumber, penafsiran (interpretasi) dan yang terakhir adalah penulisan sejarah (historiografi).

Menggali peristiwa masa lampau tidak dapat dikerjakan tanpa sumber yang mendukung sebagai data dan keterangan, baik sumber yang tertulis maupun sumber yang tidak tertulis. Oleh karena itu, dalam upaya merekonstruksi dan mengisahkan masa lampau, maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh seorang penulis adalah berusaha mendapatkan sumber sejarah yang bersifat primer⁶¹ dan sumber sekunder. Agar penulisan sampai pada tujuan yang diinginkan, maka penulis mengumpulkan berbagai sumber yang tentunya berhubungan dengan obyek penulisan skripsi ini. Sumber primer berupa naskah (tertulis) yang digunakan di antaranya yaitu arsip atau dokumen yang didapatkan dari pemerintah (Arsip Nasional Republik Indonesia Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan), Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng serta instansi terkait yang ada hubungannya dengan obyek penulisan. Adapun sumber primer

⁶¹ Menurut Louis Gottschalk, Sumber Primer adalah kesaksian daripada seorang saksi dengan mata kepala sendiri atau saksi dengan panca indera yang lain, atau dengan alat mekanis seperti diktafon, yakni orang atau alat yang hadir pada peristiwa yang diceritakannya. *Ibid*, Hal. 35.

yang tidak tertulis (lisan) yang digunakan yaitu kesaksian yang diperoleh melalui wawancara dengan pelaku pemerintahan atau tokoh masyarakat pada masa pemerintahan Haji Andi Made Ali^E. Adapun sumber sekunder yang digunakan yaitu berupa buku, majalah dan surat kabar serta karya-karya ilmiah lainnya yang tentunya juga sangat berkaitan dengan obyek penulisan.

Sumber yang telah diperoleh akan diseleksi dan dianalisis (kritik) untuk mendapatkan sumber-sumber otentik yang kredibilitasnya dapat dipercaya. Kegiatan ini dilakukan dengan dua macam kegiatan yaitu kritik intern dan kritik ekstern. Kritik ekstern dilakukan untuk mengetahui otentisitas materi, huruf serta kelengkapan dari naskah/sumber sesuai dengan zamannya. Adapun kritik intern dilakukan untuk mengetahui kredibilitas dari sumber dengan memperhatikan saling hubungan antara masalah-masalah yang terdapat dalam sumber tersebut.⁷⁾

⁷⁾ Ibid, hal. 95.

Langkah selanjutnya adalah merumuskan pernyataan (interpretasi) dari sumber-sumber yang telah diseleksi. Tafsiran atau uraian penulis akan mewarnai pernyataan yang telah dibuat. Olehnya itu, tafsiran sedapat mungkin mendekati obyektifitas dalam penulisan.

Sebagai langkah terakhir yaitu penyusunan laporan yang disajikan ke dalam skripsi ini. Langkah inilah yang disebut penulisan sejarah atau historiografi. Dalam penulisan ini, obyek yang dikaji diungkapkan secara kronologis dan sistematis agar tidak menyalahi aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam metodologi sejarah. Pemaparan secara sistematis dalam bentuk deskriptif analitis dimaksudkan agar situasi atau keadaan Soppeng pada masa pemerintahan Haji Andi Made AliE dapat diungkapkan seobyektif mungkin.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dewasa ini Ilmu Sejarah telah mengalami perkembangan pesat dengan memberikan ketentuan untuk menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial dengan tujuan agar gejala-gejala sejarah dalam berbagai aspek dapat diungkapkan.⁸¹ Dengan pendekatan ilmu-ilmu sosial tersebut, penulis berusaha mengungkapkan dan menggambarkan berbagai usaha pembangunan di bidang

⁸¹ Sartono Kartodirdjo, *Op. Cit*, hal. 120.

ekonomi, sosial budaya dan politik di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng pada masa pemerintahan Haji Andi Made AliE. Di samping itu, dalam menganalisa tindakan atau usaha yang diambil, perlu dilihat dari konteks keadaan yang melahirkan tindakan atau usaha tersebut.

Kesemuanya itu akan dikemas dalam penelitian sebagai usaha yang berdasarkan paradigma sejarah yang ada. Maksudnya, pola penelitian dalam penulisan karya ini akan berusaha semaksimal mungkin mengikuti aturan-aturan atau kaidah-kaidah dalam metodologi sejarah (Historical Of Methodology).

BAB II
GAMBARAN UMUM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOPPENG

A. Keadaan Geografis

Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng merupakan salah satu dari 23 Kabupaten dan Kotamadya di Propinsi Sulawesi Selatan. Letaknya di tengah-tengah jazirah Sulawesi Selatan dengan radius 176 Kilometer di sebelah utara Kotamadya Ujung Pandang, Ibukota Propinsi Sulawesi Selatan.

Kabupaten Soppeng dengan luas sekitar 1.500 KM² merupakan suatu daerah yang memiliki ciri khas tersendiri, di mana daerah ini tidak mempunyai laut seperti daerah lainnya di Sulawesi Selatan. Daerah Soppeng dikelilingi oleh beberapa kabupaten, yang terdiri dari :

- Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Sidenreng Rappang.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Wajo dan Bone.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Bone.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Daerah Tingkat II Barru.

Jarak antara kota Watansoppeng dengan ibukota kabupaten yang ada di sekelilingnya tidak terlalu jauh sehingga secara administratif sangat menguntungkan daerah Soppeng.

Adapun jarak antara kota Watansoppeng dengan ibukota kabupaten lainnya yaitu :

- Watansoppeng dengan kota Pangkajene (ibukota Kabupaten Sidrap) sepanjang 65 Kilometer.
- Watansoppeng dengan kota Sengkang (ibukota Kabupaten Wajo) sepanjang 47 Kilometer.
- Watansoppeng dengan kota Administratif Watampone (ibukota Kabupaten Bone) sepanjang 120 Kilometer.
- Watansoppeng dengan kota Barru (ibukota Kabupaten Barru) sepanjang 61 Kilometer.

Keadaan topografi dalam wilayah Kabupaten Soppeng cukup bervariasi yaitu mulai dari tanah datar, berbukit sampai bergunung. Adapun jenis tanahnya rata-rata terdiri atas Alluvial yang cocok untuk tanah pertanian padi sawah dan tanah Mediteran yang cocok untuk tanah perkebunan dan pembuatan keramik atau gerabah.

Seperti daerah-daerah lain pada umumnya, Kabupaten Soppeng dipengaruhi oleh musim kemarau dan musim hujan. Musim kemarau rata-rata terjadi pada bulan April sampai dengan bulan September, sedangkan musim hujan rata-rata jatuh pada bulan Oktober sampai dengan bulan Maret.

B. Keadaan Sosial Budaya

Kehidupan sosial budaya suatu kelompok masyarakat berakar dari adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri.

Berdasarkan pada pernyataan tersebut, stratifikasi sosial atau Social Stratification¹⁾ masyarakat Kabupaten Soppeng pada mulanya bersumber dari konsep *Tomanurung* (orang yang turun dari kayangan atau titisan dewa) dan rakyat kebanyakan. Konsep ini yang menjadi dasar sistem hubungan antara individu, kelompok atau keturunan yang satu dengan yang lainnya.

Masyarakat Sulawesi Selatan sebelum kekuasaan kolonial Belanda terdiri atas tiga tingkatan dalam kehidupan sosialnya, yaitu : *Anakarung* (*Anak' karaeang* dalam bahasa Makassar) ialah lapisan kaum kerabat raja-raja, *Tomaradeka* (*Tumaradeka* dalam bahasa Makassar) ialah lapisan orang merdeka yang merupakan sebagian besar rakyat Sulawesi Selatan dan tingkatan yang paling bawah adalah

¹⁾ Menurut Pitrin A. Sorokin, *Social Stratification* adalah penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat (*hirarkis*). Perwujudan adalah kelas-kelas tinggi dan kelas-kelas yang lebih rendah. Lihat Soerjono Soerkanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta : Rajawali, 1992), hal. 252.

Ata yaitu lapisan orang budak, orang yang ditangkap dalam peperangan, orang yang tidak dapat membayar hutang atau orang yang melanggar adat.²¹

Pelapisan masyarakat Soppeng pada umumnya sama seperti yang dikemukakan di atas. Pembagian masyarakat dalam tiga tingkatan tersebut merupakan faktor penting yang mempengaruhi kehidupan sosial, ekonomi, politik dan budaya masyarakat.

Demikian kuatnya peranan stratifikasi sosial tersebut sehingga pengaruhnya masih terasa sampai kini. Akan tetapi, seiring dengan perkembangan zaman, stratifikasi sosial tradisional masyarakat Soppeng sudah memudar dan telah banyak terjadi perubahan bahkan hanya tinggal basa-basi belaka dalam pergaulan sehari-hari. Hal ini disebabkan karena sistem hubungan dalam kehidupan bermasyarakat sudah mengalami penyederhanaan, dan kewajaran serta sudah tidak terikat lagi atas dasar atau prinsip-prinsip keturunan. Kenyataan ini sudah tercermin dalam hal perkawinan atau perijodohan, hubungan persaudaraan atau persahabatan dan hubungan ekonomi.

Dengan demikian, stratifikasi sosial tradisional sudah beralih kepada status sosial yang didasarkan pada

²¹ Mattulada, "Kebudayaan Bugis Makassar", dalam Koenjaraningrat, Ed. 1987, *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta, Djambatan, hll. 276.

prestasi yang diperoleh seseorang, baik karena pendidikan maupun karena keberuntungan dan keberhasilan hidup, sehingga martabat dan statusnya terangkat dalam kalangan masyarakat.

Dalam hal sistem kekerabatan, yang berlaku di daerah Bugis seperti Soppeng disebut *Asseajingeng*. *Asseajingeng* bagi orang Soppeng mempunyai peranan penting terutama dalam hal pencarian jodoh atau perkawinan untuk membentuk keluarga baru. Dalam Lontara Soppeng, hubungan perkawinan dengan istilah *Siala*. Batas pengertian *Siala* khusus dialek Soppeng dimaksudkan saling ambil antara laki-laki dengan perempuan.³⁾

Sejak *TomanurungE* menjadi raja pertama di Soppeng yang kemudian dilanjutkan oleh raja-raja berikutnya, kecenderungan dalam hal pencarian jodoh dikembangkan dalam lingkungan kerabat terdekat, baik kerabat dari pihak ayah maupu ibu. Hal ini berlaku karena masyarakat Soppeng tidak mengenal klean atau marga. Anggapan mereka bahwa hubungan kekerabatan dalam keluarga ayah, ibu dan anak-anak mempunyai kedudukan dan kewajiban yang sama karena berasal dari pertalian darah nenek moyangnya. Oleh karena itu, selaku sistem maka kekerabatan orang Bugis Makassar sesuai

3) Panannrangi Hamid, 1991, *Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng*, Ujung Pandang, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional, hal. 54.

dengan sistem parental atau batinial.⁴⁾

Sistem tersebut lebih berkembang luas dalam hubungan kekerabatan para anggota keluarga, sehingga walaupun berjauhan tempat atau daerah, mereka tetap diikat oleh pertalian darah yang disebut *Asseajingeng*. Dalam *Asseajingeng*, masih dapat dibedakan antara *Rappe* dan *Siteppang* atau *Sompunglolo*. *Rappe* adalah seajing anggota kerabat saudara yang dinamakan anak dan *Siteppang* atau *Sompunglolo* ialah anggota kerabat yang berlainan berkat adanya hubungan perkawinan (*affens*) yang biasa disebut keluarga.⁵⁾

Konsepsi orang Soppeng tentang *Sompunglolo* yaitu dimaksudkan sebagai hubungan kekerabatan berdasarkan atas ikatan darah atau kelahiran, sedangkan *Seajing* adalah hubungan kekerabatan berdasarkan perkawinan.

Dalam sistem kepercayaan, masyarakat Soppeng pada mulanya sama dengan kebanyakan suku-suku lain di Sulawesi Selatan, yaitu mempercayai adanya kekuatan-kekuatan sakti di luar manusia. Konsepsi masyarakat Bugis tentang kekuatan sakti biasanya dihubungkan dengan

4) Mattulada, 1975, *Latoa Suatu Lukisan Deskriptif-Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis*, Jakarta, Disertasi Universitas Indonesia, hal. 41.

5) *Ibid*, hal. 42.

kehidupan alam gaib, yaitu suatu alam yang lain yang dikuasai oleh makhluk-makhluk gaib (super natural power). Untuk menciptakan hubungan dengan makhluk sakti itu biasanya dilakukan upacara penyembahan atau sesajian yang biasanya dipimpin oleh seorang *Bissu*. Di samping memimpin upacara keagamaan, *Bissu* juga mengetahui tata cara hidup, adat kerajaan dan sebagai penjaga serta pemelihara kerajaan, yang dalam bahasa Bugis disebut *Arajang*, yaitu simbol kekuatan dewa.

Kepercayaan terhadap kekuatan gaib tersebut sangat berpengaruh di daerah Soppeng. Hal ini terbukti dengan ditemukannya beberapa peninggalan megalitik. Namun dengan semakin majunya ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengaruh agama Islam, maka upacara tradisional semacam itu sudah kurang bahkan sudah sulit untuk disaksikan. Upacara yang berhubungan dengan diri manusia sejak dari lahir sampai meningkat menjadi dewasa, kawin dan meninggalnya seorang masih sering kita lihat, tetapi beberapa upacara tradisional sudah ditinggalkan. Kalau pada masa lampau seseorang anak yang dilahirkan dibacakan mantera-mantera oleh dukun beranak, maka sekarang disesuaikan dengan

kebutuhan dengan cara-cara dalam Islam. Bahkan ajaran Islam sangat mewarnai kehidupan masyarakat Soppeng sehari-hari dalam berbagai aspek. Hal ini tentunya disebabkan karena memang masyarakat Soppeng mayoritas beragama Islam.

Adapun mengenai pendidikan, sampai sekarang ini telah terdapat banyak lembaga pendidikan di Kabupaten Soppeng, mulai dari Taman Kanak-Kanak sampai perguruan tinggi swasta dimilikinya. Disamping itu, juga telah banyak terbuka tempat kursus seperti kursus menyetik, akuntansi, bahasa Inggris dan kursus komputer. Bahkan pemerintah senantiasa mengupayakan peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dengan mengadakan program pendidikan khusus dan penyuluhan-penyuluhan seperti program kejar Paket "A" dan "B", program kerja PKK serta penyuluhan pertanian, keluarga berencana, kesehatan dan lingkungan hidup.

C. Lintasan Sejarah Soppeng

Dalam buku-buku lontara dikatakan bahwa sebelum terbentuk menjadi suatu kerajaan, Soppeng dilanda kekacauan dan kemiskinan serta kemelaratan timbul di mana-mana. Saat itulah Soppeng mengalami kehancuran (sianre bale tauwwe). Untuk mengatasi keadaan tersebut, sepakatlah 60 orang pemuka masyarakat (Matoa) di daerah Soppeng untuk mengangkat seorang junjungan yang dapat mengatasi kemelut tersebut dan menuntun mereka ke arah masyarakat yang stabil. Tampilah Arung Bila (salah

seorang Matoa) mengambil inisiatif untuk mengadakan musyawarah besar.⁶¹

Ketika para Matoa sedang bermusyawarah di bawah pohon yang rindang (pohon Aluppang), tiba-tiba mereka dikagetkan oleh dua ekor burung kakatua (Cakkele) yang ribut memperebutkan setangkai padi. Musyawarah terganggu dan Arung Bila memerintahkan untuk menghalau burung tersebut serta mengikuti mereka kemana terbang. Kedua burung kakatua tersebut terbang masuk hutan dan peserta musyawarah mengikutinya sampai burung itu menghilang. Tiba-tiba mereka melihat sejumlah orang di tempat yang disebut Sekka Nyili dan di situ mereka mendapati seseorang yang berpakaian indah yang sementara duduk di atas batu besar serta dipayungi dengan payung besar oleh tiga orang. Ketika bertanya, Arung Bila diberitahukan bahwa orang yang duduk di atas batu itu adalah orang yang turun dari kayangan (Tomanurung) dan bernama "Manurungge ri Sekka Nyili".⁷¹

Berdasarkan musyawarah dari Matoa yang merupakan

⁷¹ Salam Baco, 1995, *Soppeng dari Kerajaan Menjadi Kabupaten*, Watansoppeng, tanpa penerbit, hal. 13.

⁶¹ Abdul Razak Daeng Patunru, 1969 *Sejarah Ringkas Kerajaan Soppeng*, Ujung Pandang, Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, hal. 4.

kepala-kepala suku, maka disepakatilah untuk mengangkat Tomanurung tersebut sebagai pemimpin untuk seluruh wilayah Soppeng. Maka terjadilah "Si Telli" (ikrar bersama) antara Tomanurung dengan para Matoa tersebut. Pada saat itu pula, Tomanurung diberi nama La Temmamala dan menerima pengangkatan sebagai raja dengan gelar "Datu Soppeng". Dengan demikian, La Temmamala merupakan Datu Soppeng pertama dan peristiwa tersebutlah yang merupakan awal terbentuknya kerajaan Soppeng yaitu pada tahun 1300 Masehi.⁸⁾

Pada masa pemerintahan La Temmamala, pucuk pemerintahan dipegang oleh Raja atau Datu yang dibantu oleh berbagai jabatan fungsionaris pemerintahan, seperti tersusun sebagai berikut :

1. Datu Soppeng, yang dibantu oleh sebuah Dewan Kerajaan yang menjalankan pemerintahan sehari-hari. Dewan ini dapat diumpamakan dengan DPRD sekarang.
2. Arung Bila, selaku Kepala Pemerintahan. Dapat disamakan dengan Perdana Menteri sebuah negara sekarang ini.
3. Arung Botto, yang mengatur pemerintahan yaitu mengkoordinir daerah kerajaan yang terdiri dari tujuh Lili. Dapat diumpamakan dengan Menteri Dalam Negeri. Juga berstatus Dewan Adat. Anggota dewan tersebut yaitu :

⁸⁾ Salam Baco, Op. Cit, hal. 16.

4. Arung Ujung, yang mengatur urusan-urusan yang berhubungan dengan kerajaan. Dapat diumpamakan dengan Menteri Luar Negeri.
5. Watang Lipu, yang mengatur urusan pertahanan kerajaan. Dapat diumpamakan dengan Menteri Pertahanan.
6. Tiga (3) Pabbicara, yaitu dua orang yang berfungsi mengurus urusan kehakiman dan satu orang mengurus segala sesuatu yang belum termasuk dalam bidang tugas yang telah ditetapkan.⁹⁾

Sistem atau aturan pemerintahan yang dijalankan oleh La Temmamala tersebut berlaku secara turun temurun di Kerajaan Soppeng. Namun setelah Kerajaan Soppeng diduduki Belanda pada tahun 1906, dimana Soppeng pada waktu itu di bawah pemerintahan Datu Zainab (Raja ke-35) dan sebagai penggantinya La Pabeangi (Selle Datue), suami dari Sitti Zainab Datu Soppeng, maka bangsa Belanda memberlakukan pemerintahan militer yang dipimpin oleh Kapten Cooy. Namun pada tahun 1907 pemerintahan militer yang mereka jalankan dirubah menjadi pemerintahan sipil. Waktu itu diadakan pembuatan kantor yang baru. Walau demikian, Raja atau Datu Soppeng tetap pada kedudukannya dan pemerintahan Belanda tidak langsung berhubungan dengan rakyat, tetapi segala perintahnya melalui Raja dan Hadatnya.

⁹⁾ *Ibid*, hal. 20.

Lahirnya Regeling 1928 mengakibatkan terbentuknya Zelfbestuur, di mana kerajaan Soppeng termasuk wilayah koordinasi Asisten Residen Bone, sebagaimana Zelfbestuur Bone dan Zelfbestuur Wajo. Dalam hal ini, Raja atau Datu Soppeng berada di bawah koordinasi Asisten Residen Bone dan Kontrolir Soppeng.

Pemerintahan yang demikian berlaku sampai masa pendudukan Jepang, yaitu pada tahun 1942. Dalam struktur pemerintahan, pemerintah Jepang tetap memberlakukan struktur pemerintahan semasa Belanda, kecuali yang bertentangan dengan kepentingan militer Jepang.¹⁰⁾ Pemerintahan Jepang ini berakhir pada tanggal 15 Agustus 1945, yaitu pada saat Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu.¹¹⁾

Setelah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah dalam hal ini Gubernur Sulawesi ditugaskan untuk menyiapkan pembubaran dan pembagian daerah Sulawesi Selatan dalam daerah otonom tingkat II. Pada tanggal 12 Agustus 1952, Gubernur Sulawesi mengeluarkan

¹⁰⁾ Bayu Suryaningrat, 1986, *Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang*, Jakarta, Dewa Ruci Press, hal. 69.

¹¹⁾ M.C. Ricklefs, 1992, *Sejarah Indonesia Modern*, Dialihbahasakan oleh Dharmono Hardjowidjono, Yogyakarta, Gajah Mada University Press, hal. 315.

peraturan Nomor 34 tahun 1952 tentang pembubaran dan pembagian wilayah dalam daerah swatantra yang terdiri atas tujuh daerah Swatantra, yaitu :

1. Daerah Swatantra Tingkat II Makassar, wilayah pemerintahannya meliputi daerah Gowa, Takalar, Jeneponto, Maros dan Pangkajene Kepulauan dengan pusat pemerintahannya di Makassar.
2. Daerah Swatantra Tingkat II Bone, wilayah pemerintahannya meliputi daerah Bone, Soppeng dan Wajo dengan pusat pemerintahannya di Bone.
3. Daerah Swatantra Tingkat II Pare-Pare, dengan pusat pemerintahannya meliputi daerah Pare-Pare, Barru, Sidenreng Rappang, Pinrang dan Enrekang dengan pusat pemerintahannya di Pare-Pare.
4. Daerah Swatantra Tingkat II Mandar, wilayah pemerintahannya meliputi daerah Majene, Polmas dan Mamuju dengan pusat pemerintahannya di Majene.
5. Daerah Swatantra Tingkat II Luwu dengan pusat pemerintahannya di Luwu.
6. Daerah Swatantra Tingkat II Tator dengan pusat pemerintahannya di Tator.
7. Daerah Swatantra Tingkat II Sulawesi Tenggara, wilayah pemerintahannya meliputi wilayah Propinsi Sulawesi

Tenggara sekarang.¹²⁾

Berdasarkan pada peraturan tersebut, maka Soppeng masih tetap merupakan bagian dari Bone, seperti pada masa pemerintahan kolonial Belanda dan Jepang atau sebelum terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan daerah Soppeng sebagai bagian dari Daerah Swatantra Tingkat II Bone tersebut dan bukan sebagai otonom, menimbulkan reaksi dari masyarakat Soppeng yang pada akhirnya pemerintah menyetujui terbentuknya Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng.

¹²⁾ Departemen Dalam Negeri Propinsi Sulawesi Selatan, 1991, *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Sulawesi Selatan*, Ujung pandang, tanpa penerbit, hal. 192-193.

BAB III

TERBENTUKNYA KABUPATEN DAERAH TINGKAT II SOPPENG

A. Awal Terbentuknya

Kedudukan daerah Soppeng sebagai bagian dari Daerah Swatantra tingkat II Bone menimbulkan reaksi dari masyarakat Soppeng. Masyarakat Soppeng menginginkan daerahnya menjadi daerah otonom¹⁾ atau daerah istimewa yang setingkat dengan kabupaten. Demikian pula halnya dengan masyarakat Wajo yang juga merupakan bagian dari Daerah Swatantra Tingkat II Bone.

Untuk merealisasikan keinginan masyarakat tersebut, maka pada tanggal 1 Maret 1954 dikirimkan surat kepada Menteri Dalam Negeri perihal Mosi DPRDS Bone supaya daerah Soppeng dan Wajo masing-masing diberi status kabupaten²⁾. Kemudian pada tanggal 31 Oktober 1954, diadakan rapat untuk membentuk panitia persiapan kabupaten. Rapat ini dihadiri oleh partai-partai, organisasi-organisasi,

¹⁾ Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (Depdikbud), otonom berarti berdiri sendiri atau dengan pemerintahan sendiri. Adapun daerah otonom berarti kelompok sosial yang memiliki hak dan kekuasaan menentukan arah tindakannya sendiri.

²⁾ Bahan Arsip : ANRI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Keleksi Arsip Pemerintahan Propinsi Sulawesi (1950-1960), No. Reg. 209.

kepala-kepala wanua, golongan terkemuka dan rakyat Soppeng. Dalam rapat itu juga, Haji Andi Wana (Raja Soppeng pada waktu itu) mengangkat 3 (tiga) orang pembentuk panitia persiapan dengan kekuasaan penuh yang terdiri atas :

1. Andi Abdul Gani sebagai ketua/anggota.
2. Ibrahim sebagai penulis/anggota
3. Pammusureng sebagai penulis/anggota.

Adapun susunan panitia persiapan kabupaten yang berhasil dibentuk oleh team pembentuk panitia yaitu sebagai berikut :

- 1) Paduka Haji Andi Wana sebagai penasehat.
- 2) Haji Abdul Gani sebagai ketua merangkap anggota.
- 3) Nurdin Umar dari Pemuda Demokrat sebagai wakil ketua.
- 4) Ibrahim dari Pemuda Demokrat sebagai penulis.
- 5) Pammusureng dari Masyumi sebagai anggota.
- 6) Bustamin dari P.S.I.I sebagai anggota.
- 7) Djohannes dari P.N.I sebagai anggota.
- 8) Abdul Baraniah dari P.K.R sebagai anggota.
- 9) - dari Parkindo (tidak diketahui namanya) sebagai anggota.
- 10) Mutu dari G.P.I.I sebagai anggota.
- 11) Andi Baloko dari Muslimat sebagai anggota.
- 12) St. Nurung dari wanita P.S.I.I sebagai anggota.
- 13) St. Marhumah dari Perwira sebagai anggota.
- 14) Andi Saransi Umar dari Wanua sebagai anggota.



- 15) Haji Andi Meru dari Wanua sebagai anggota.
- 16) Andi Achmad dari Wanua sebagai anggota.
- 17) Andi Hasan dari Wanua sebagai anggota.

Panitia tersebut mengeluarkan lagi resolusi yang mendesak pemerintah tingkat atas agar tuntutan DPRDS Bone mengenai berdirinya Soppeng sebagai daerah otonom segera dikabulkan. Resolusi tersebut didukung sepenuhnya oleh seluruh lapisan masyarakat Soppeng, organisasi politik dan kemasyarakatan ³⁾.

Setelah tiga tahun lamanya rakyat Soppeng memperjuangkan tuntutannya, maka pada tanggal 13 Maret 1957 pemerintah mengabulkan tuntutan tersebut dengan Undang-Undang Darurat Nomor 4 tahun 1957 tentang Pembubaran Daerah Bone dan pembentukan Daerah Bone, Daerah Wajo dan Daerah Soppeng.⁴⁾

Sebagai daerah otonom dengan nama Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng, maka pada tanggal 31 Maret 1957 di Istana Datu Soppeng (tempat kediaman Haji Andi Wana) diadakan sidang pembentukan panitia pembentukan DPRD peralihan daerah Soppeng yang dihadiri oleh Haji Andi Wana serta tokoh-tokoh organisasi politik dan kemasyarakatan.

³⁾ Bahan Arsip, *Ibid.*

⁴⁾ *Lembaran Negara Republik Indonesia, No. 4 Tahun 1957.*

Pada tanggal 10 Maret 1958, Gubernur Sulawesi melantik anggota DPRD peralihan yang telah dibentuk, yang terdiri dari :

- 1) Ambo Dalle dari Masyumi sebagai Ketua.
- 2) Muhammad Thaib dari Masyumi sebagai Wakil Ketua.
- 3) Andi Syamsuddin dari Masyumi sebagai anggota.
- 4) Muhammad Djafar dari Masyumi sebagai anggota.
- 5) Mas Alia dari Masyumi sebagai anggota.
- 6) Abdul Gani dari Masyumi sebagai anggota.
- 7) H. Sitti Fatimah dari Masyumi sebagai anggota.
- 8) St. Saodah Latif dari Masyumi sebagai anggota.
- 9) Andi Husain dari Masyumi sebagai anggota.
- 10) Andi Muri dari Masyumi sebagai anggota.
- 11) Jahja dari Masyumi sebagai anggota.
- 12) Andi Abdul Rasyad dari Masyumi sebagai anggota.
- 13) Muhammad Husni dari Masyumi sebagai anggota.
- 14) Muhammad Arief dari Masyumi sebagai anggota.
- 15) Saling dari Masyumi sebagai anggota.
- 16) Andi Hasan dari Masyumi sebagai anggota.
- 17) Abdul Kadir dari Masyumi sebagai anggota.
- 18) Andi Palle dari P.S.I.I sebagai anggota.
- 19) Andi Abu Bakar dari I.P.K.I sebagai anggota.

20) Andi Abu dari I.P.K.I sebagai anggota.⁵¹

Berubahnya status daerah Soppeng menjadi sebuah Kabupaten dan diangkatnya Haji Andi Wana sebagai kepala daerah, maka dimulailah kegiatan penataan dan pembenahan administrasi pemerintahan daerah. Struktur organisasi pemerintahan daerah Soppeng semasa berstatus daerah Swapraja telah diubah dan disesuaikan dengan organisasi pemerintahan yang telah ditetapkan dari Pusat. Segala persoalan yang muncul dan menyangkut kepentingan daerah Soppeng tidak diajukan lagi kepada DPRD Bone, tetapi langsung kepada DPRD Soppeng untuk mendapat jalan keluarnya.

Soppeng resmi menjadi suatu daerah Kabupaten pada tanggal 13 Maret 1957 berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1957. Dari itulah maka tanggal 13 Maret mengandung arti tersendiri bagi masyarakat Soppeng, di mana tanggal tersebut ditetapkan menjadi hari jadi atau hari lahirnya Kabupaten Soppeng. Penetapan hari jadi ini dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng Nomor 3 Tahun 1990 tentang Penetapan Hari Jadi Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng.

⁵¹ Bahan Arsip : ANRI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan, Koleksi Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi (1950-1960), No. Reg. 162.

B. Bupati Yang Pernah Memerintah

Sampai sekarang ini telah terjadi beberapa kali pergantian Bupati Kepala Daerah di Soppeng, yaitu sejak Soppeng melepaskan diri dari Daerah Bone menjadi suatu daerah tersendiri pada tanggal 13 Maret 1957.

Adapun susunan para tokoh yang pernah menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng, yaitu sebagai berikut :

1. Haji Andi Wana, merupakan Datu Soppeng yang ke-36 (Raja Soppeng yang terakhir) dan diangkat menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. U.P. 7/2/24 tanggal 6 Pebruari 1957. Masa jabatannya yaitu sejak lahirnya Kabupaten Soppeng sampai dengan tanggal 1 April 1960.
2. Haji Andi Machmud, diangkat menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. U.P. 7/9/196-1043 tanggal 16 April 1960 dan dilantik pada tanggal 20 Mei 1960. Masa jabatannya mulai tanggal 1 April 1960 sampai dengan tanggal 14 Agustus 1964.
3. A.M.Amin Dg. Situru, diangkat sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan No. 348/VII/64 tanggal 20 Juli 1964. Masa jabatannya sampai dengan tanggal 11 Mei 1965.

4. Haji Andi Made AliE, diangkat sebagai pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 5 Mei 1965. Setelah diadakan pemilihan Bupati oleh DPRGR Soppeng, Haji Andi Made AliE memperoleh suara terbanyak dan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 14/6/39-947 tanggal 12 Juli 1965, beliau diangkat menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng. Haji Andi Made AliE menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng sampai dengan tanggal 19 Desember 1979. Untuk lebih jelasnya mengenai masa pemerintahan Haji Andi Made AliE, dapat diketahui pada bab berikutnya yang merupakan inti penulisan Skripsi ini.
5. Jamaluddin Muhammadong, memangku jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng selama lima tahun, yaitu sejak tanggal 19 Desember 1979 sampai dengan tanggal 31 Desember 1984.
6. Drs. Haji Umar Lakunnu, memangku jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng sejak tanggal 31 Desember 1984. Menurut rencana masa jabatannya berakhir pada tanggal 30 Desember 1989, namun karena calon penggantinya bermasalah maka beliau diberikan kepercayaan untuk melanjutkan kepemimpinannya sampai dengan tanggal 25 Juni 1990.

7. Haji Abbas Sabbi, SH, memangku jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng pada tanggal 25 Juni 1990 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.53.556. Haji Abbas Sabbi, SH memangku jabatannya sampai dengan tanggal 1 Agustus 1995.⁶¹
8. Drs. Haji Andi Paeruddin Saisal, diangkat menjadi Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 131.53-116 tanggal 17 Juli 1995 dan dilantik pada tanggal 1 Agustus 1995. Pada saat penulisan Skripsi ini, beliau masih menjalankan tugas-tugas pemerintahannya selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng.

C. Hasil yang telah dicapai

Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng yang sekarang ini berusia 40 tahun, telah mengalami pasang surut dalam perjalanan sejarahnya. Berbagai hambatan dan gangguan yang muncul senantiasa dapat dihadapi dan dilalui dengan semangat persatuan dan kesatuan. Setiap Bupati yang memerintah mampu melahirkan gagasan-gagasan besar yang pada gilirannya tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan rakyatnya menuju pencapaian pembangunan demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan

⁶¹ Salam Baco, 1995, *Soppeng dari Kerajaan Menjadi Kabupaten*, Watansoppeng, tanpa penerbit, hal. 80-82.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pelaksanaan pembangunan di Daerah Tingkat II Soppeng yang senantiasa bertitik tolak pada strategi pembangunan yang ditetapkan dalam GBHN serta berbagai kebijaksanaan pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah (Bappeda), merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah daerah beserta seluruh aparat dan lapisan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah senantiasa memberikan pengarahan, bimbingan dan motivasi serta senantiasa berusaha menciptakan iklim yang sehat dalam mengikutsertakan masyarakat dalam setiap bidang pembangunan. Di samping itu, disiplin kerja yang tinggi serta sikap mental dengan penuh semangat sangat menunjang keberhasilan pembangunan.

Berkat kerja keras pemerintah bersama seluruh lapisan masyarakat, telah tercatat beberapa prestasi atau penghargaan yang diraih Kabupaten Soppeng sebagai tanda keberhasilan dalam melaksanakan pembangunan, baik pembangunan mental, spritual maupun pembangunan material. Tercatat dalam lembaran sejarah bahwa Soppeng pada Pelita II berhasil mendapat penghargaan "Parasamya Purna Karya Nugraha" sebagai daerah yang maju dalam melaksanakan dan meningkatkan pembangunan di segala bidang untuk suatu tahap Pelita. Penghargaan tersebut merupakan salah satu pendorong untuk lebih meningkatkan pembangunan dalam berbagai bidang.

Sampai pada masa pemerintahan Abbas Sabbi, SH, Soppeng makin membenahi dirinya dalam pembangunan dengan motto "Soppeng Berhiber" yang merupakan singkatan dari Soppeng yang bersih, hijau, indah, berbunga dan berbuah. Konsep "Berhiber" merupakan kebijakan pemerintah dalam melaksanakan setiap program pembangunan yang akan dilaksanakan dalam meningkatkan taraf hidup, tingkat kecerdasan dan kesejahteraan masyarakat, termasuk di dalamnya usaha membudayakan hidup secara sehat.

Berkat usaha-usaha yang dilakukan dalam berbagai bidang, terutama dalam bidang kebersihan, maka pada tanggal 6 Juni 1994 Soppeng merupakan satu-satunya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan yang mendapat penilaian positif dari pemerintah pusat dengan penghargaan piagam "ADIPURA". Bahkan pada tahun 1995 Soppeng memperlihatkan kembali keberhasilannya dalam bidang kebersihan dengan meraih Piala "ADIPURA" kategori kota kecil.

Menurut Bupati Abbas Sabbi, SH, gelar atau penghargaan itu bukanlah tujuan utama, tetapi bagaimana secara terus menerus melibatkan dan membudayakan masyarakat hidup bersih, sehat, indah, rapi dan sejuk dengan motto "Berhiber" yang merupakan motto Kota Watansoppeng sekaligus

Kabupaten Soppeng secara keseluruhan saat ini.⁷⁾

Berkat program yang dilaksanakan secara berkesinambungan, sampai sekarang ini Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng yang dipimpin oleh Bupati Drs. Haji Andi Paeruddin Saisal, telah berhasil meraih tiga kali Piala "ADIPURA" yaitu pada tahun 1995 dan tahun 1996 serta tahun 1997 ini. Bahkan dalam bidang pertanian, Kabupaten Soppeng dikenal sebagai salah satu daerah lumbung padi. Selain itu, pada bulan Maret 1996 yang lalu, Gubernur Sulawesi Selatan, Haji Zainal Basri Palaguna mencanangkan Kabupaten Daerah TK II Soppeng sebagai Pusat Sutera di Kawasan Timur Indonesia.⁸⁾

Dalam sektor budaya dan pariwisata, Soppeng memiliki Taman Purbakala Jera'LompoE, Pemandian alam Ompo, pemandian air panas Lejja', alam wisata Citta, Rumah Adat Sao Mario, dan lain-lainnya.

⁷⁾ Moh. Soemardy, 1996 "Delapan 'Nakhoda' diusia ke-39 Kabupaten Soppeng", *Harian Pedoman Rakyat*, tanggal 13 Maret 1996, hal. 8.

⁸⁾ Akhyar, 1996, "Soppeng, Pusat Sutera Alam di KTI", *Majalah Mingguan Berita Semangat Baru*, No. 047, hal. 15.

Keberhasilan pembangunan tersebut tidak terlepas dari usaha-usaha Pemerintah Daerah yang tiada henti-hentinya memantapkan dan mengembangkan program-program pembangunan di segala bidang serta peran aktif masyarakat dalam mendukung dan melaksanakan pembangunan.

BAB IV

SOPPENG PADA MASA PEMERINTAHAN HAJI ANDI MADE ALIE

A. Haji Andi Made AliE sebagai Bupati Soppeng yang Keempat

Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Haji Andi Made AliE merupakan tokoh pemimpin daerah Soppeng yang ke empat sejak Soppeng resmi menjadi Kabupaten Daerah Tingkat II. Beliau memerintah setelah masa kepemimpinan Haji Andi Wana, Haji Andi Mahmud dan A.M. Amin Dg. Situru.

Sebelum menerima tugas dan tanggung jawab untuk memimpin Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng, Haji Andi Made AliE bertugas di Sulawesi Tenggara sebagai PAKORKOLAKA KODIM 1412 yang diperbantukan pada Operasi Kilat penumpasan DI/TII Kahar Muzakkar dengan daerah tugas Kolaka. Atas perintah dari PEPELRADA yang pada waktu itu oleh Bapak Brigjen M. Yusuf (mantan Pangab, Jenderal M. Yusuf), dia dipanggil untuk memangku suatu jabatan dan tanggung jawab yang asing baginya yaitu sebagai Bupati Kepala Daerah. Sebagai seorang prajurit yang mendapat perintah dari atasan, maka dengan itikad baik dan bagaimanapun dia mestinya melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Suatu hal yang mungkin cukup meringankan dalam menjalankan tugas ini yaitu pengalamannya waktu bertugas di daerah Soppeng sebagai Komandan Distrik Militer 1410

yang dijabatnya dari tanggal 1 Januari 1961 sampai dengan tanggal 23 Maret 1964. Dengan demikian, setidak-tidaknya dia kenal karakter masyarakat yang akan dipimpinnya.

Dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan tanggal 5 Mei 1965 No. 118/V/65, Haji Andi Made AliE ditunjuk sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng dan dilantik pada tanggal 11 Mei 1965. Selanjutnya diadakan pemilihan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng dan ternyata Haji Andi Made AliE mendapat suara terbanyak. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 12 Juli 1965 No. 14/6/39-947, Haji Andi Made AliE diangkat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng.

Setelah masa jabatan lima tahun tersebut berakhir, dia diberhentikan dengan hormat dan diangkat kembali sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng berdasarkan Surat Keputusan Mendagri tanggal 22 Juli 1970 Nomor Pemda 7/4/39-165. Tugas tersebut dilaksanakan sampai tanggal 8 Agustus 1974, setelah dia terpilih sebagai calon tunggal oleh DPRD Tingkat II Soppeng.

Berdasarkan Surat Keputusan Mendagri tanggal 17 Juli 1974 Nomor Pem. 7/9/24-309, dia diangkat kembali sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng dan dilantik/diambil sumpahnya oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Agustus 1974.

Masa jabatan yang kedua ini berakhir pada bulan Agustus 1979. Pada tanggal 21 September 1979, DPRD Tingkat II Soppeng mengadakan pemilihan Bupati Kepala Daerah. Dalam sidang pleno khusus DPRD ditetapkan 3 (tiga) orang calon yaitu Letkol. Jamluddin Muhammadong yang memperoleh 14 suara, A. Ahmad Said dan Drs. M. Nasir Isa yang masing-masing memperoleh 4 suara.

Berhubung dengan itu, maka sejak tanggal 8 Agustus 1979 (berakhirnya masa jabatan yang kedua) sampai pada hari pelantikan Bupati yang baru yaitu kurang lebih selama 5 (lima) bulan, Haji Andi Made AliE menyelesaikan tugas-tugasnya yang masih perlu diselesaikan.¹⁾

Dari uraian di atas, dapat diketahui bahwa Haji Andi Made AliE memangku jabatan sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng selama kurang lebih 14 (empat belas) tahun lamanya, yaitu sejak 11 Mei 1965 sampai dengan tanggal 19 Desember 1979. Masa empat belas tahun tersebut merupakan masa pengabdian yang cukup panjang dan sangat menentukan dalam perkembangan Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng. Bahkan pada akhir masa jabatan Haji Andi Made AliE sebagai Bupati Soppeng, yaitu beberapa bulan saja

¹⁾ Salam Baco, 1995, *Soppeng dari Kerajaan Menjadi Kabupaten*, Watansoppeng, tanpa penerbit, hal. 81.

setelah berakhirnya Pelita II, Soppeng mendapat penilaian positif dari pemerintah pusat yang ditandai dengan berhasilnya memperoleh PARASAMYA PURNA KARYA NUGRAHA sebagai Daerah yang paling maju dalam pembangunan di segala bidang untuk tahap Pelita. Soppeng merupakan satu-satunya Daerah Tingkat II di Sulawesi Selatan yang memperoleh penghargaan tersebut. Disamping itu, Soppeng juga berhasil meraih berbagai prestasi di tingkat Propinsi Sulawesi Selatan, terutama dalam hal pembangunan desa.

Keberhasilan kepemimpinan Haji Andi Made AliE tersebut tentunya berkat pola kepemimpinan, kebijaksanaan serta usaha-usaha nyata dalam merealisasikan setiap program pembangunan. Mengenai hal ini, akan dijelaskan pada bagian berikutnya.

B. Keadaan dan Kebijakan Pembangunan

Pada masa pemerintahan Haji Andi Made AliE, Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng terdiri dari 5 (lima) Wilayah Kecamatan dan 1 (satu) Perwakilan Kecamatan, yaitu sebagai berikut :

- 1) Kecamatan Lalabata dengan ibukota Watansoppeng;
- 2) Kecamatan Lilirilau dengan ibukota Cabenge;
- 3) Kecamatan Liliriaja dengan ibukota Cangadi;
- 4) Kecamatan Marioriwawo dengan ibukota Takalala;
- 5) Kecamatan Marioriawa dengan ibukota Batu-Batu;

6) Perwakilan Kecamatan Donri-Donri dengan ibukota Tajuncu (sekarang sudah resmi menjadi sebuah Kecamatan).

Adapun Desa pada masa itu berjumlah 26 Desa dan pada tahun 1978 dimekarkan menjadi 34 Desa. Adapun kampung yang ada sampai akhir masa jabatan Haji Andi Made AliE, tetap 90 kampung.

Pada awal masa jabatan Haji Andi Made AliE, betapa sulitnya komunikasi perhubungan antara Kecamatan, Desa dan Kampung dengan pusat pemerintahan Kabupaten di Watansoppeng. Keadaan yang demikian sering menghambat pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan maupun pelaksanaan pembangunan.

Untuk menetapkan berbagai usaha pembangunan, maka langkah pertama yang dilakukan Pemerintah Daerah adalah mengadakan inventarisasi tentang segala kegiatan dan permasalahan dengan mengunjungi setiap kecamatan, desa dan kampung, bahkan sampai ke tempat-tempat yang selama ini belum pernah dikunjungi oleh aparat pemerintah tingkat Kabupaten dan Kecamatan. Dalam mengadakan peninjauan ini, Bupati Haji Andi Made AliE mengikutsertakan semua unsur Pimpinan daerah, Kepala Jawatan/Dinas atau instansi serta Team hiburan.

Dari kunjungan tersebut, maka diketahui berbagai masalah umum yang dihadapi oleh masyarakat dan Pemerintah

Daerah Tingkat II Soppeng dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan. Adapun masalah umum yang dimaksud antara lain sebagai berikut :

- Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng yang luasnya sekitar 1.500 Km², meliputi tanah yang bergunung-gunung, dataran rendah, sungai-sungai, rawa-rawa dan danau, menjadikan beberapa wilayahnya membutuhkan sarana komunikasi perhubungan yang memadai. Bahkan sarana komunikasi perhubungan (jalan dan jembatan) antara wilayahnya mengalami kerusakan dan tidak terpelihara antara lain karena gangguan keamanan dari DI/TII dan juga memang belum atau tidak ada sama sekali. Di samping itu, juga karena musim hujan yang setiap tahunnya merusak jalan dan jembatan yang ada.
- Desa-desa banyak terletak pada lokasi pegunungan atau pesisir danau dan melalui sungai-sungai untuk mencapainya sehingga tidak memungkinkan adanya peningkatan ekonomi penduduk desa maupun pembangunan desa itu sendiri.
- Penduduk desa banyak yang tinggal menetap di kota-kota atau terpencar jauh antara satu desa dengan yang lainnya akibatnya gangguan keamanan dari DI/TII, sehingga sulit dijangkau oleh pemerintah desa. Mereka yang tinggal di hutan-hutan atau pegunungan, bertani dan berladang secara berpindah-pindah karena faktor keamanan sehingga

merusak kawasan hutan dan bisa menimbulkan banjir serta erosi dimusim hujan, disamping akibat lainnya.

- Tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk desa maupun Pamong desa pada umumnya masih sangat rendah.
- Fasilitas perkantoran masih sangat terbatas dan belum memenuhi syarat sehingga mempengaruhi kegairahan dan semangat kerja para pegawai.
- Fasilitas-fasilitas untuk pelayanan kesehatan dan fasilitas-fasilitas yang memungkinkan kesempatan belajar yang seluas-luasnya untuk anak-anak usia sekolah maupun yang ingin melanjutkan pendidikannya, masih jauh dari mencukupi apalagi memadai.
- Sarana pemasaran sebagai pusat untuk memasarkan hasil-hasil produksi rakyat dan untuk memperoleh atau membeli kebutuhan, masih sangat kurang di desa dan belum memenuhi syarat.
- Kesejahteraan pegawai dan kehidupan masyarakat desa pada umumnya masih tradisional.
- Tenaga-tenaga personil masih kurang, utamanya tenaga-tenaga terampil dan ahli.²⁾

Dengan memperhatikan situasi dan kondisi dari

²⁾ Memori Haji Andi Made AliE (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng tahun 1965-1979), hal. 19.

masyarakat tersebut, maka Bupati Haji Andi Made AliE mengambil ketetapan bahwa yang harus menjadi program utama adalah membangun pedesaan. Untuk maksud tersebut, maka seluruh aparat Pemerintah Daerah, Kecamatan dan Desa, tokoh-tokoh masyarakat dan para sarjana serta pemuka masyarakat Soppeng yang berdomisili di luar daerah dan lain-lainnya, diundang untuk membicarakan langkah-langkah yang akan diambil dalam usaha membangun Daerah Tingkat II Soppeng. Dalam pertemuan ini diambil suatu kesepakatan bahwa program utama adalah melaksanakan pembangunan dengan titik tolak dari Desa ke Kota. Kebijakan pembangunan ini didasarkan pada kenyataan bahwa lebih dari 80 % (delapan puluh persen) penduduk Soppeng berdiam dan bertempat tinggal bahkan hidup dan kehidupannya berasal dan berada di desa. Selain itu, desa merupakan basis produksi dan pertahanan, seperti yang telah menjadi pengalaman pada masa-masa yang lalu.

Dalam pelaksanaan program pembangunan dari Desa ke Kota ini, dibarengi pula dengan ajakan dan himbauan kepada seluruh lapisan masyarakat untuk melibatkan diri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan.

Pola kebijakan yang ditempuh Bupati Haji Andi Made AliE dalam melaksanakan pembangunan di kabupaten daerah Tingkat II Soppeng dititikberatkan pada bidang ekonomi, khususnya peningkatan sektor pangan. Atas

kebijaksanaan tersebut, maka pada awal masa jabatannya sampai dengan tahun 1979 yang merupakan periode konsolidasi dan rehabilitasi, pembangunan dan perbaikan sarana dan prasarana produksi. Di samping itu, juga digalakan pembangunan dan perbaikan sarana perhubungan. Setelah perbaikan dan pembangunan sarana produksi dan perhubungan tersebut, maka diadakanlah pula pembangunan sarana pemasaran.³¹

Titik tolak pembangunan dari *Desa ke Kota* dengan kebijaksanaan pada ketiga usaha tersebut, manampakkan adanya perubahan yang nyata dalam kehidupan rakyat. Bahkan pada Pelita I dan Pelita II, usaha ini dilanjutkan dan ditingkatkan terus dengan dana yang berasal dari penghasilan Daerah Tingkat II Soppeng sendiri serta ditunjang pula oleh adanya proyek Inpres dan lain-lain.

C. Usaha-Usaha yang Dilakukan dalam Pembangunan Daerah.

1. Bidang Ekonomi

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa pola pembangunan yang ditempuh Bupati Haji Andi Made AliE dalam melaksanakan pembangunan, dititikberatkan pada bidang ekonomi, khususnya peningkatan sektor pangan.

³¹ *Ibid*, hal. 5.

Untuk itu, maka sampai pada tahun 1969 yang merupakan periode konsolidasi dan rehabilitasi, diadakan rehabilitasi dan membangun sarana dan prasarana produksi yaitu sebanyak 23 bendungan dan irigasi desa di seluruh wilayah Kabupaten Soppeng dengan memanfaatkan sungai-sungai dan mata air yang ada. Di samping itu juga diadakan perbaikan dan pembangunan sarana perhubungan yaitu jalan dan jembatan pada poros-poros utama yang menghubungkan pusat pemerintahan Kecamatan dan Ibukota Kabupaten, ibukota kecamatan dengan ibukota kecamatan lainnya, desa dengan ibukota kecamatan serta desa-desa itu sendiri. Diadakan pula pembangunan pasar-pasar permanent di tiap ibukota Kecamatan serta merehabilitasi dan membangun pasar-pasar desa dalam rangka memfungsikan dan menjadikan pasar sebagai pusat ekonomi maupun sebagai pusat atau tempat bagi rakyat untuk memperoleh atau mendapatkan kebutuhan hidupnya.

Setelah ketiga sarana tersebut, maka perhatian pemerintah daerah selanjutnya adalah peningkatan pendapatan dan kesejahteraan rakyat. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka dilakukanlah berbagai usaha dalam beberapa sektor ekonomi. mengenai hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. P r o d u k s i

Padi adalah hasil utama masyarakat Daerah Tingkat II Soppeng sejak dahulu sampai sekarang. Biasanya tanaman ini ditanam di sawah-sawah atau di ladang. Pada waktu Haji Andi Made AliE mulai memangku jabatannya, luas sawah yaitu 20.612 Ha dan ladang seluas 30.973 Ha. Sampai pada hari terakhir masa jabatannya, luas sawah sudah mencapai 22.035,89 Ha dan luas ladang sudah mencapai 31.741,18 Ha. Demikian pula dalam hal produksinya, di mana pada waktu mulai memangku jabatannya, produksi padi baru mencapai sekitar 61.415 ton padi kering atau 70.708 ton beras dan sampai akhir Pelita II (1978) meningkat mencapai 152.554,4 ton padi kering atau 99.160,36 ton beras.

Peningkatan luas lahan pertanian rakyat yang diikuti dengan meningkatnya hasil/produksi adalah berkat berbagai usaha terutama pada Pelita I dan Pelita II. Pada Pelita I, proyek penyuluhan pertanian memegang peranan penting dalam meningkatkan keterampilan para petani guna meningkatkan produktifitas pertanian. Hal ini berarti menaikkan pula pendapatan perkapita petani.

Secara garis besar, usaha-usaha yang dilakukan dalam meningkatkan produktifitas pertanian tanaman pangan diantaranya yaitu sebagai berikut :

- Menanamkan pengertian dengan penyuluhan bahwa pertanian menetap dan menggunakan teknologi modern dapat mempertahankan produktifitas tanah.

- Pemakaian jenis bibit unggul padi sawah guna mempercepat kemajuann dan peningkatan produksi.
- Pemberantasan hama dan penyakit dengan penggunaan pestisida dan alat semprot.
- Meningkatkan animo petani untuk bersawah.
- Meningkatkan pengairan.
- Intensifikasi Bimas Inmas dengan pelaksanaan Panca Usaha Tani.

Khusus mengenai Intensifikasi padi pada setiap tahunnya relatif mengalami fluktuasi prosentasi jumlah realisasi, terutama jumlah areal. Adapun mengenai realisasi Bimas sejak musim tanam 1970 sampai dengan 1979 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1

Realisasi Bimas di Kabupaten Soppeng
Pada Musim Tanam 1970 - 1979

No.	Tahun	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Keterangan
1.	1970	-	3.610,27	-
2.	1971	7.000	10.320,52	147,44 %
3.	1972	11.704	7.540,84	64,43 %
4.	1973	14.000	15.646,98	111,76 %
5.	1974	15.000	15.646,98	104,00 %
6.	1975	15.000	11.877,49	76,18 %
7.	1976	15.000	9.866,10	66,00 %

8. 1977	15.000	9.381,42	62,54 %
9. 1978	10.000	15.599,12	155,00 %
10. 1979	5.600	8.761,49	156,46 %

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, dapat diketahui bahwa pada tahun 1972, 1975, 1976 dan tahun 1977, target yang ingin dicapai tidak terealisasi sepenuhnya. Hal ini disebabkan karena adanya serangan hama (tungro) dan masih adanya tunggakan kredit Bimas yang belum dibayar petani. Selain itu juga disebabkan karena kurang berfungsinya pengairan sebagaimana mestinya serta beredarnya pupuk liar yang harganya murah. Adapun pada tahun 1978 dan 1979, realisasi Bimas melampaui target. Hal ini dimungkinkan karena cuaca yang cukup normal dan penyaluran sarana produksi yang cukup lancar.

Perlu dijelaskan bahwa yang meningkat realisasinya dari tahun ke tahun adalah Inmas. Meningkatnya realisasi Inmas ini disebabkan antara lain karena pada tahun 1975, 1976 dan 1977, banyak beredar pupuk yang harganya dibawah harga pemerintah dan prosedur Inmas semakin dipermudah. Di samping itu, kemampuan petani untuk membeli sarana produksi secara kontan semakin meningkat. Adapun mengenai realisasi Inmas selama tahun 1973 sampai tahun 1979, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2

Realisasi Inmas di Kabupaten Soppeng
Pada Musim Tanam 1973 - 1979

No.	Tahun	Target (Ha)	Realisasi (Ha)	Keterangan
1.	1973	3.800	165,00	4,34 %
2.	1974	7.500	246,48	3,29 %
3.	1975	7.500	336,11	4,48 %
4.	1976	7.500	6.855,35	91,40 %
5.	1977	7.500	7.204,03	96,05 %
6.	1978	12.000	12.615,21	100,62 %
7.	1979	4.400	7.458,71	169,52 %

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa dalam beberapa tahun yaitu tahun 1973, 1974, 1975, 1976 dan tahun 1977, realisasi Inmas tidak mencapai target walaupun setiap tahunnya mengalami peningkatan. Adapun pada tahun 1978 dan tahun 1977, realisasi Inmas melampaui target.

Mengenai penggunaan pupuk dan pestisida, juga menunjukkan peningkatan yang cukup menggembirakan walaupun belum mencapai target. Hal ini disebabkan karena kebanyakan petani baru mau menggunakan pestisida apabila padinya terserang hama atau penyakit. Demikian pula dalam pengolahan lahan juga mengalami perkembangan, dimana para petani sudah menggunakan traktor mini. Sampai akhir masa

jabatan Haji Andi Made AliE, di daerah Soppeng sudah terdapat 119 unit traktor mini, yang 40 diantaranya merupakan bantuan Presiden.

Walaupun sasaran produksi tidak tercapai dengan berbagai faktor, namun dengan berbagai usaha tersebut di atas, maka produksi dan produktifitas padi menunjukkan peningkatan. Mengenai hasil tanaman padi (pangan) selama masa pemerintahan Haji Andi Made AliE, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3
Tingkat Produktifitas Tanaman Padi (pangan)
di Kabupaten Soppeng Tahun 1966 - 1978

No.	Tahun	Tanaman (Ha)	Panen (Ha)	Produksi (Ton)	Rata-Rata Hasil (Qt/Ha)
1.	1966	24.757	22.468	63.861,00	28,42
2.	1967	21.172	20.167	57.163,00	28,34
3.	1968	24.698	22.890	67.358,57	29,43
4.	1969	24.910	23.384	72.138,40	30,85
5.	1970	30.450	29.287	93.977,10	32,09
6.	1971	35.032	33.467	113.887,50	34,03
7.	1972	23.019	10.082	32.685,69	32,42
8.	1973	37.179	30.652	134.018,10	43,70
9.	1974	35.003	29.599	90.026,06	30,42
10.	1975	37.561	34.963	132.708,03	35,10
11.	1976	31.901	34.458	131.043,08	38,03
12.	1977	27.320	28.847	127.748,05	44,28
13.	1978	87.137	29.929	152.554,04	49,74

Sumber : Dinas Pertanian Kab. Soppeng.

Peningkatan produksi seperti yang tertera pada tabel di atas, sudah mempunyai pengaruh atau akibat yang lebih baik terhadap penghasilan petani. Di samping itu, juga ditunjang dengan adanya pemasaran yang lebih baik dan dukungan dari pemerintah, sehingga disamping dapat memenuhi kebutuhannya juga dapat dijual untuk kebutuhan lokal maupun untuk kebutuhan pangan nasional.

Selain tanaman padi, masyarakat petani juga menanam tanaman-tanaman palawija seperti jagung, ubi-ubian, kacang tanah, kacang ijo dan kacang kedelai. Demikian pula dengan tanaman hortikultura seperti bawang merah, kubis, lombok, tomat, terong serta berbagai macam buah-buahan. Produksi tanaman tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun karena para petani semakin berminat menanam padi.

Hal ini dimungkinkan karena jaringan irigasi yang semakin baik dan pengetahuan petani mengenai tanaman padi semakin maju serta faktor iklim yang lebih memungkinkan untuk menanam padi.

Selain sektor produksi tersebut, persuteraan alam yang cukup produktif dalam menunjang perekonomian rakyat. Persuteraan alam di daerah Soppeng dikenal sejak tahun 1964 dan mengalami perkembangan secara pasang surut karena bencana alam (kekeringan) dan serangan penyakit (febrin).

Masalah utama yang dihadapi dalam usaha pengembangan sutera alam adalah masih terbatasnya kemampuan Proyek

Sutera Alam untuk memproduksi bibit. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mengusahakan import bibit dari Jepang yang dimulai sejak tahun 1975. Walaupun demikian, produksi benang sutera belum dapat dipenuhi secara maksimal sebagaimana yang pernah dicapai pada tahun 1971 yaitu sebanyak 90 ton. Produksi pada tahun 1971 ini dapat dicapai karena pada waktu itu masyarakat masih bebas mengadakan pembibitan sendiri dan cuaca yang cukup baik serta penyakit febrin belum menyerang.

Setelah berjangkitnya penyakit febrin yaitu pada tahun 1972, 1973 dan memuncak pada tahun 1974, maka rakyat pada waktu itu dilarang untuk membibitkan sendiri dan semua bibit ulat jenis lokal dimusnahkan dan untuk tidak terjadi kekosongan, maka diambil langkah seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu produksi proyek dan mengimport bibit dari Jepang.⁴⁾

Usaha persuteraan lam yang diusahakan oleh rakyat, baik sebagai mata pencaharian pokok maupun sebagai mata pencaharian sampingan, turut meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di pedesaan serta menampung tenaga kerja (mengurangi pengangguran) dan menunjang penghijauan.

⁴⁾ H. Abu Bakar Kadir, BA : Wawancara, 10 April 1997, Watansoppeng.

Mengenai usaha peternakan di daerah Soppeng kebanyakan adalah usaha rakyat dilaksanakan secara perorangan. Yang berbentuk perusahaan (Perseroan) kebanyakan belum menunjukkan usaha dan hasil sebagaimana yang diharapkan. Pada masa pemerintahan Haji Andi Made AliE, populasi ternak di daerah Soppeng menunjukkan peningkatan, baik kuantitas maupun kualitasnya. Khusus selama Pelita II, populasinya dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 4
Populasi Ternak di Kabupaten Soppeng
dari Tahun 1974 - 1978

No. Tahun	Kuda (Ekor)	Sapi (Ekor)	Kerbau (Ekor)	Kambing (Ekor)	Ayam (Ekor)	Itik (Ekor)
1. 1974	7.927	37.525	1.749	6.600	196.729	60.818
2. 1975	7.609	35.056	2.025	4.541	153.142	54.452
3. 1976	7.609	35.056	2.825	4.541	153.142	54.452
4. 1977	8.515	41.721	1.839	8.382	393.458	99.636
5. 1978	4.121	44.278	2.311	10.259	413.131	102.629

Sumber : Dinas Peternakan Kab. Soppeng.

Terjadinya populasi ternak tersebut disebabkan karena selama Pelita II diadakan peningkatan penyebaran bibit unggul khususnya ayam ras, pelaksanaan pemberantasan penyakit hewan menular secara intensif dan menyeluruh

serta bimbingan dan penyuluhan tentang cara-cara beternak yang lebih baik.

Sedangkan mengenai perikanan, sesuai dengan keadaan geografis daerah Soppeng, maka perikanan di daerah ini adalah perikanan air tawar (danau, rawa-rawa, kolam). Di antara perikanan air tawar tersebut, yang paling potensial adalah ikan danau yang pada setiap tahun produksinya turun naik. Apabila musim kemarau berkepanjangan, maka hasil penangkapan meningkat karena air di danau menjadi dangkal sehingga mempermudah penangkapan.

Masalah utama yang dihadapi di sektor perikanan ini khususnya ikan danau adalah semakin mendangkalnya danau Tempe. Walau demikian, untuk meningkatkan produksi ikan danau maupun ikan rawa-rawa, maka Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Perikanan, melepaskan bibit ikan mas rata-rata sejuta ekor setiap tahunnya.⁵⁾

Berkat usaha tersebut, maka selama Pelita II produksi perikanan telah menunjukkan hasil yang cukup memuaskan. Di samping itu, peningkatan produksi ini juga disebabkan karena terjadinya musim kemarau yang cukup berkepanjangan sehingga volume air di danau Tempe berkurang dan sangat memungkinkan penangkapan ikan secara intensif.

⁵⁾ Data Kantor Dinas Perikanan Kabupaten Soppeng.

b. Penyaluran Kredit, Tabungan, Koperasi dan Industri

Dalam rangka untuk membantu pengusaha-pengusaha ekonomi lemah di bidang peningkatan usaha dan pendapatan masyarakat di daerah Soppeng, maka selama Pelita II telah disalurkan Kredit Investasi Kecil/Kredit Modal Kerja Permanen (KIK/KMKP) oleh Bank-Bank Pemerintah. Di samping itu, juga disalurkan Kredit Mini dan Kredit Candak Kulak (KCK).

Bantuan berupa KIK/KMKP, Kredit Mini dan KCK kepada para pengusaha ekonomi lemah tersebut, dimaksudkan sebagai bantuan dan juga sebagai pembinaan. Jadi dengan demikian, disamping mempunyai arti sosial, juga sangat strategis sehingga manfaatnya sangat dirasakan oleh para pengusaha lemah. Hal ini terbukti karena pada kenyataannya usaha dan pendapatan para pengusaha meningkat dan tunggakan pembayaran kembali relatif tidak ada.

Di samping program bantuan kepada pengusaha lemah, selama Pelita II pemerintah juga menggalakkan pola Gerakan Tabungan Nasional, terutama melalui Tabanas dan Taska. Berkat usaha tersebut, maka terjadi peningkatan jumlah penabung dan tabungan tiap tahunnya. Adapun mengenai perkembangan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 5
Perkembangan Jumlah Penabung dan Tabungan
di Kabupaten Soppeng Tahun 1974 - 1979

No.	Tahun	Penabung (Orang)	Tabungan (Rp)
1.	1974	4.343	46.342.779,11
2.	1975	9.081	52.017.166,81
3.	1976	10.909	114.361.484,51
4.	1977	18.036	216.991.926,15
5.	1978	18.517	224.177.120,15
6.	1979	18.036	320.560.000,00

Sumber : Memori H, Andi Made AliE, hal. 139

Terjadinya peningkatan jumlah penabung dan tabungan setiap tahun tersebut, manandakan bahwa tingkat pendapatan masyarakat cukup meningkat serta adanya kesadaran masyarakat untuk menabung melalui Gerakan Tabungan Nasional.

Mengenai pertumbuhan dan perkembangan koperasi kecuali BUUD/KUD (Badan Usaha Unit Desa/Koperasi Unit Desa) selama Pelita II, pada umumnya mengalami fluktuasi dari segi jumlahnya jika dibandingkan dengan Pelita I. Akan tetapi dari segi mutu makin meningkat, baik aktifitas usaha, dana-dana yang tersedia maupun jumlah anggotanya. Adanya fluktuasi dari segi jumlahnya ini disebabkan adanya

beberapa buah koperasi meleburkan diri (amalgamasi) menjadi suatu bentuk atau suatu unit usaha koperasi.⁶⁾

Adapun jeni-jenis koperasi yang ada di Kabupaten Soppeng sampai akhir masa jabatan Haji Andi Made AliE yaitu koperasi, Konsumsi, Persuteraan Alam, Perikanan, Simpan Pinjam, Pegawai Negeri, Veteran, Kepolisian, Pensiunan ABRI dan BUUD/KUD. Terjadinya perkembangan perkoperasian di daerah ini disebabkan karena adanya organisasi, administrasi dan manajemen yang terarah dan mantap serta usaha pembinaan melalui penyuluhan dan latihan kepada pengurus koperasi. Di samping itu, juga dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap usaha-usaha koperasi dalam meningkatkan taraf hidup.

Sedangkan mengenai industri, selama masa pemerintahan Haji Andi Made AliE di Kabupaten Soppeng telah terdapat beberapa jenis industri. Industri yang dimaksud antara lain yaitu industri tembakau, rokok putih, makanan dan minuman, pakaian jadi, pertukangan serta barang galian dan persuteraan alam. Jumlah maupun volume usaha koperasi di Kabupaten Soppeng mengalami perkembangan selama Pelita II. Pada tahun 1974, jumlah perusahaan yang bergerak dibidang industri (kebanyakan perusahaan perorangan) berjumlah 220

6) Drs. T. Hamaluddin : Wawancara, 5 April 1997, Watansoppeng.

buah dan sampai akhir Oktober 1978 sudah mencapai 421 buah. Dari keseluruhan usaha industri tersebut, sampai akhir tahun 1978 dapat menyerap tenaga kerja sebanyak 1.966 orang.⁷⁾

Meningkatnya usaha-usaha industri di Soppeng dari segi kuantitas maupun kualitasnya disebabkan antara lain :

- Adanya Fasilitas kredit berupa modal kerja dan investasi dari pemerintah.
- Adanya bimbingan usaha dari perindustrian, baik bimbingan langsung maupun melalui latihan-latihan.

c. Keuangan Daerah

Dalam rangka usaha kelangsungan dan peningkatan pembinaan pemerintahan Daerah Tingkat II Soppeng baik dalam kuantitas maupun kualitas pembangunan yang dicapai dalam pelaksanaan Pelita I dan dilanjutkan pada Pelita II, sangat diperlukan adanya program yang terpadu dengan pelaksanaannya.

Sebagai realisasi dari Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggungjawab⁸⁾ Khususnya di bidang pendapatan daerah,

⁷⁾ Memori Haji Andi Made AliE (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng tahun 1965-1979), hal. 145.

⁸⁾ Menurut Penjelasan UU No. 5 Tahun 1974, otonomi yang nyata berarti bahwa pemberian otonomi kepada Daerah harus didasarkan pada faktor-faktor, perhitungan-perhitungan dan tindakan-tindakan atau kebijaksanaan yang benar-benar dapat menjamin daerah yang bersangkutan secara nyata mampu mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan bertanggungjawab berarti bahwa melancarkan pembangunan yang tersebar di seluruh pelosok negara dan serasi atau tidak bertentangan dengan pengarah-pengarah yang telah diberikan, serasi dengan pembinaan politik dan kesatuan bangsa, menjamin hubungan yang serasi antara pemerintah pusat dan daerah serta dapat menjamin perkembangan dan pembangunan Daerah. Lihat M. Solly Lubis, *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintah Daerah* (Bandung : Alumni, 1983), hal. 77.

maka pemerintah berusaha semaksimal mungkin untuk meningkatkan pendapatan/penghasilan setiap tahun dengan tetap berpedoman pada peraturan perdagangan yang berlaku, baik peraturan perundang-undangan yang datang dari pemerintah yang lebih tinggi maupun peraturan Daerah sendiri.

Dengan dasar tersebut, maka dalam pelaksanaan Pelita II (1974-1978) dalam menangani masalah pendapatan Daerah terdapat beberapa hambatan yang dijumpai pemerintah. Walaupun demikian, berkat adanya kerja sama dan saling pengertian di kalangan aparat, maka permasalahan yang timbul dapat diatasi dengan baik.

Sumber-sumber pendapatan Daerah yang dapat dikelola masing-masing memiliki potensi yang berbeda, tetapi pada hakekatnya penggalan potensi sumber-sumber keuangan Daerah tersebut telah meliputi unsur-unsur kewajiban masyarakat dalam memberikan partisipasinya. Olehnya itu, usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pada sumber-sumber pendapatan Daerah yang ada, senantiasa dilakukan penyesuaian-penyesuaian yang didasarkan pada potensi masyarakat yang memang sudah berkembang dinamis.⁹⁾

Dinas Pendapatan daerah Tingkat II Soppeng yang terbentuk pada tahun 1974 dan dilengkapi dengan personil

⁹⁾ H. Abu Bakar Kadir, BA : Wawancara, 10 April 1997 Watansoppeng.

dan peralatan yang cukup memadai serta diberi tugas dan tanggung jawab untuk menangani sumber-sumber pendapatan daerah, turut memberikan keyakinan kepada pemerintah bahwa pendapatan Daerah dapat ditingkatkan sesuai dengan potensi dan kemampuan yang ada.

Dengan pendapatan daerah yang meningkat dari tahun ke tahun, di samping subsidi/perimbangan keuangan Daerah untuk belanja pegawai, bantuan dan pembangunan dari pusat dalam bentuk Inpres, bantuan dana pembangunan dari pemerintah Tingkat I Sulawesi Selatan dan lain-lainnya, maka Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD) juga mengalami peningkatan.

Dari keseluruhan jumlah dana yang telah diinvestasikan di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng sejak Pelita I sampai akhir masa jabatan Haji Andi Made AliE, telah banyak memberi manfaat yang langsung dirasakan oleh masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan.

2. Bidang Sosial Budaya

Perkembangan yang dicapai pada sektor pembangunan perekonomian telah meningkatkan taraf kehidupan ekonomi rakyat dan menjadi pendorong utama untuk meningkatkan pembangunan di bidang mental spritual/sosial budaya. Untuk itu, setelah rehabilitasi dan pembangunan sara produksi, perhubungan dan pemasaran, maka langkah selanjutnya yang

diambil pemerintah adalah meningkatkan sarana pendidikan, peribadatan, kesehatan dan budaya atau berbagai usaha untuk meningkatkan kehidupan masyarakat di bidang sosial budaya.

Adapun mengenai usaha-usaha yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng dalam beberapa sektor bidang sosial budaya, yaitu antara lain sebagai berikut :

a. Pendidikan

Pelaksanaan pendidikan adalah merupakan salah satu perwujudan untuk meningkatkan taraf kecerdasan setiap warga masyarakat. Hal tersebut tentunya memerlukan perhatian yang serius dari pemerintah agar tujuan pendidikan dapat tercapai.

Pelaksanaan kegiatan pendidikan dasar selama masa pemerintahan Haji Andi Made AliE khususnya pada Pelita I dan Pelita II, dititikberatkan pokok-pokok kebijaksanaan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan yaitu pemerataan kesempatan untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya kepada anak-anak.

Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng dalam usahanya mencapai maksud tersebut, telah berhasil menampung anak-anak sekolah (usia 7-12 tahun) hingga akhir Pleita II sebesar 38.856 murid dari 41.850 anak usia sekolah. Untuk menampung jumlah murid yang setia tahun meningkat, maka setiap tahun pula pemerintah Daerah mengusahakan

perkembangan sarana pendidikan dengan kemampuan keuangan daerah serta bantuan yang diperoleh dari Pemerintah Pusat melalui Inpres. Jumlah sekolah Dasar Negeri sampai akhir Pelita II sudah mencapai 157 buah dan Sekolah Dasar Inpres sebanyak 38 buah atau seluruhnya 195 buah. Di samping itu terdapat 12 buah sekolah Taman Kanak-Kanak yang tersebar di Ibukota Kabupaten sampai ke desa-desa.¹⁰⁾

Untuk meningkatkan mutu pengetahuan guru-guru dan mutu pendidikan murid sekolah dasar dengan meningkatkan daya serap mereka, maka diadakanlah penataran-penataran secara bertahap dengan berbagai mata pelajaran atau bidang studi. Di samping itu juga mengutus guru-guru sekolah dasar untuk mengikuti kursus-kursus keterampilan yang dilaksanakan di tingkat propinsi. Yang tidak kalah pentingnya adalah adanya inisiatif berupa dorongan swadaya gotong-royong dari masyarakat dalam mendukung lancarnya pendidikan sekolah dasar.¹¹⁾

Sedangkan mengenai Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), sampai akhir Pelita II sudah terdapat 14 buah dan pelajar yang tertampung juga mengalami peningkatan setiap tahunnya. Demikian pula halnya dengan Sekolah Lanjutan

¹⁰⁾ *Memori Haji Andi Made AliE (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng tahun 1965-1979)*, hal. 158.

¹¹⁾ Drs. T. Hamaluddin : *Wawancara, 5 April 1997 Watansoppeng.*

masyarakat sudah dapat merubah kebiasaan-kebiasaan tradisional ke arah yang lebih maju.

Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat, diantaranya yaitu :

- Kursus Pengetahuan Dasar (KPD)
- Kursus Kemajuan Masyarakat (KKM)
- Kursus Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (KPKK)
- Kursus Kejuaruan Masyarakat (KKM)
- Kursus Penggerak Kegiatan Belajar (KPKB)

Selain kegiatan tersebut, setiap tahunnya para remaja mengikuti beberapa macam latihan keterampilan dan kegiatan-kegiatan lainnya, seperti :

- 16 (enam belas) pemuda diutus ke Ujung Pandang untuk mengikuti latihan kewiraswastaan bidang keterampilan montir, pertanian dan pertukangan pada tahun 1977 dan 1978.
- Seorang pemuda Soppeng utusan Sulawesi Selatan mengikuti Program Kapal Asean selama dua bulan, yaitu dari bulan November samapi Desember 1977.
- Seorang puteri sebagai utusan Sulawesi Selatan untuk dilatih menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional pada tahun 1977 dan dua orang untuk tingkat propinsi setiap tahun.

- 3 (tiga) pemuda diutus ke Ujung Pandang untuk mengikuti latihan tentang organisasi kepemudaan, yang dilaksanakan dari tanggal 20 sampai dengan 29 Juni 1977.
- Para pemuda Soppeng turut pula berpartisipasi pada penerimaan pemuda-pemuda Canada pada tanggal 14 Pebruari sampai dengan 12 Maret 1977 dan bersama-sama mengadakan kegiatan kebersihan lingkungan dan perbaikan jalan-jalan desa.¹²

Dengan mengikuti berbagai kegiatan tersebut, maka pengetahuan dan keterampilan para pemuda juga mengalami perkembangan yang pada akhirnya dapat diterapkan dan diamalkan di tengah-tengah masyarakat.

b. Agama

Sejak dahulu sampai sekarang penduduk Kabupaten Soppeng mayoritas beragama Islam. Islam masuk di Soppeng pada tahun 1609 yaitu pada masa pemerintahan Raja Beowe ke XIV.¹³⁾

Demikian pula halnya pada masa pemerintahan Bupati Haji Andi Made AliE, dimana hampir seluruh penduduk

¹²⁾ Memori Haji Andi Made AliE (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng tahun 1965-1979), hal. 170.

¹³⁾ Adam Musa, 1982, *Kedatangan Agama Islam di Kabupaten Soppeng*, Watansoppeng, Seksi Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng, hal. 6.

Kabupaten Soppeng beragama Islam. Adapun mengenai keadaan jumlah penduduk umat beragama selama Pelita II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6
Keadaan Jumlah Umat Beragama
di Kabupaten Soppeng Tahun 1974 - 1978

No. Tahun	A g a m a				Jumlah
	Islam	Protestan	Katolik	Lain-lain	
1. 1974	232.755	609	195	-	233.559
2. 1975	234.888	579	239	-	233.706
3. 1976	236.984	616	320	-	238.410
4. 1977	240.254	516	240	-	241.010
5. 1978	241.802	516	240	64	242.622

Sumber : Kantor Departemen Agama Kab. Soppeng.

Berdasarkan pada tabel tersebut di atas, maka sangat jelas bahwa masyarakat Soppeng mayoritas beragama Islam. Oleh karena itu, penulis memfokuskan pembahasan pada usaha-usaha yang dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan ajaran agama Islam.

Selama Pelita I dan Pelita II, di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng dilaksanakan berbagai usaha dalam bidang kerohanian dengan tujuan memberikan pelayanan terhadap rakyat dan kepentingan umat beragama dalam menjalankan dan mengembangkan agama serta pemeliharaan dan

pengembangan kerukunan hidup dan toleransi antar umat beragama.

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain yaitu bimbingan dan pengembangan Proyek Pembinaan Mental Beragama, Pondok Pasantren, penyelenggaraan MTQ serta mengadakan penyuluhan agama dan rawatan rohani melalui dakwah. Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan fungsi dan peranan masyarakat sebagai realisasi daripada sila Ketuhanan Yang Maha Esa, membina dan mengembangkan sikap mental agama didalam masyarakat sehingga terwujud iklim kejiwaan dan suasana tertib dan tenang serta aman lahir maupun bathin. Di samping itu, juga untuk menegakkan kembali sendi-sendi kehidupan keagamaan yang telah banyak dirongrong oleh gerakan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan golongan atheis.

Adapun kegiatan atau usaha yang dilakukan dalam pembinaan dan pengembangan ajaran agama Islam, antara lain sebagai berikut :

1. Pembangunan Tempat Ibadah

Pembangunan tempat-tempat ibadah selama Pelita I dan Pelita II menunjukkan perkembangan yang sangat baik jika dibandingkan sebelum adanya Pelita. Dengan adanya kebijaksanaan pemerintah daerah melalui Pelita, jelas kelihatan peningkatan jumlah tempat ibadah dan sampai pada akhir masa pemerintahan Haji Andi Made AliE, sudah

terdapat sebanyak 262 buah mesjid/mushallah dan dua buah gereja.

Mesjid yang belum rampung pembangunannya sampai tahun 1979 yaitu Mesjid Raya Watansoppeng, Mesjid Raya Takalala dan Mesjid Macanre di Cabenge. Khusus untuk pembangunan Mesjid Raya Watansoppeng yang terletak di tengah kota kabupaten, ditangani oleh sebuah Panitia Pembangunan Mesjid yang dibentuk pada tahun 1970 dan diketuai oleh Haji Andi Made AliE selaku Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng. Dana yang digunakan dalam pembangunan mesjid tersebut berasal dari bantuan Presiden (Banpres), bantuan Pemda Tingkat II Soppeng melalui APBD dan sumbangan dari masyarakat dan para dermawan. Bantuan dari Pemda Tingkat II Soppeng merupakan perangsang untuk lebih mendorong kegairahan masyarakat dalam mendukung dan melaksanakan setiap program pembangunan.¹⁴

2. Pembinaan Pondok Pasantren

Untuk menghasilkan insan-insan pembangunan yang bermutu dan bertaqwa, maka Pemerintah Daerah senantiasa mengadakan pembinaan terhadap pondok pesantren yang ada. Para santri diberikan bekal pengetahuan agama serta berbagai keterampilan praktis. Di samping itu, sarana

¹⁴⁾ H. Abu Bakar Kadir, BA : *Wawancara*, 10 April 1997, Watansoppeng.

pendidikan agama juga tidak terlepas dari perhatian pemerintah.

Dengan kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng, Perguruan Islam Beowe (Ganra) diberikan pinjaman beberapa hektar tanah untuk membantu pengembangannya. Demikian pula halnya dengan sekolah-sekolah Islam lainnya yang senantiasa diberikan bantuan, baik oleh Pemda Tingkat I maupun oleh Pemda Tingkat II Soppeng sendiri. Pemberian bantuan tersebut dimaksudkan untuk lenih melengkapi berbagai fasilitas pendidikan yang pada akhirnya akan meningkatkan mutu dan keterampilan murid/santri.

Adapun sekolah-sekolah Islam atau pesantren yang terdapat di Kabupaten Soppeng pada masa pemerintahan Haji Andi Made AliE yaitu sebagai berikut :

- Madrasah Asaiyah CabengE.
- Madrasah DDI GUPPI AbbanuangE.
- Madrasah lalabata GUPPI Lapajung.
- DDI GUPPI Watu.
- P.G.A. Muhammadiyah Lajoa.
- Mualimin GUPPI Salotungo.
- Perguruan Islam Beowe Ganra.
- Perguruan Islam GUPPI Pattojo.
- Perguruan Islam Batu-Batu.¹⁵

¹⁵: Data Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng.

3. Pembentukan Team Penerangan dan Dakwah.

Dalam rangka meningkatkan kesadaran dan kerukunan meningkatkan kesadaran dan kerukunan serta toleransi beragama sebagai penunjang dalam pembangunan dibidang mental spritual pada khususnya dan pembangunan meterial pada umumnya, maka setiap tahun yaitu utamaya pada bulan ramadhan diadakan penerangan-penerangan dan dakwah. Kegiatan ini dilaksanakan sejak tahun 1965 di seluruh mesjid dan mushallah oleh Team Penerangan dan Dakwah.

Team Penerangan dan Dakwah tersebut senantiasa memberikan arahan serta wejangan kepada masyarakat tentang hidup berkeluarga, bermasyarakat dan bernegara. Sebagai anggota dari team ini antara lain para anggota Muspida, Majelis Ulama, Kepala Jawatan/Dinas, anggota-anggota DPRD, guru-guru agama, serta tokoh-tokoh masyarakat yang representatif.¹⁶⁾

4. Musabaqah Tilawatil Qur'an

Untuk memupuk dan mengembangkan seni baca Al Qur'an kearah pengenalan isi dan maksud yang terkandung di dalamnya, maka Pemerintah daerah bekerja sama dengan Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng mengadakan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) dua kali setahun dengan

¹⁶⁾ H. Abu Bakar Kadir, BA : Wawancara, 10 April 1997, Watansoppeng.

peserta dari tiap-tiap desa dalam wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng.

Di samping seni baca Al Qur'an secara tradisional tersebut, juga diadakan kegiatan yang sama sebagai persiapan untuk mengikut MTQ tingkat propinsi. Kegiatan ini diikuti oleh utusan-utusan dari tiap kecamatan dan dilaksanakan di ibukota kecamatan secara bergilir.¹⁷¹

5. Pelaksanaan Zakat Fitrah

Dalam hal pelaksanaan zakat fitrah, Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng membentuk pengurus Baitul Mal dan Badan/Amil zakat di tingkat Kabupaten, kecamatan dan desa dengan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng tanggal 10 Oktober 1973. Surat Keputusan tersebut dikeluarkan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama tanggal 13 September 1969 No. 1/BER/MDN-MAG/1969.

Adapun mengenai pembagian dan pemanfaatan zakat fitrah yang diterima Badan/Amil Zakat Desa, kecamatan dan Baitul Mal Kabupaten, yaitu sebagai berikut :

- Badan/Amil Zakat Desa untuk Amil Desa, fakir mis-kin dan yatim piatu.
- Badan/Amil Zakat Kecamatan untuk pemeliharaan dan pembinaan madrasah, pesantren, perguruan Islam, mesjid/-

¹⁷¹ Memori Haji Andi Made AliE (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng tahun 1965-1979), hal. 174.

mushallah dan uang jasa untuk anggota pengurus Badan Amil zakat Kecamatan dan desa, pegawai sara', pengurus mesjid, guru-guru mengaji dan biaya administrasi.

- Baitul Mal Kabupaten untuk bantuan pembangunan mesjid raya Watansoppeng, Muallah, Garimin, Ibnussabil, pengurus Baitul Mal dan Biaya administrasi.

6. Urusan Haji

Jumlah jamaah calon haji selama masa pemerintahan Haji Andi Made AliE mengalami perkembangan setiap tahun, terutama pada tahun 1978 dan 1979. Adapun mengenai perkembangan hemaah haji selama Pelita I dan Pelita II dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 7
Keadaan Jumlah Jamah Haji
di Kabupaten Soppeng Tahun 1969 - 1979

No. Tahun	Berangkat dengan kapal		Jumlah
	Laut	Udara	
1. 1969	113	7	120
2. 1970	54	-	54
3. 1971	74	-	74
4. 1972	74	-	74
5. 1973	74	12	86
6. 1974	75	89	164
7. 1975	68	39	107
8. 1976	28	17	45

9. 1977	32	64	96
10. 1978	-	294	294
11. 1979	-	293	293

Sumber : Kantor Departemen Agama Kab. Soppeng.

Terjadinya perkembangan jumlah jamaah haji seperti pada tabel di atas, disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan masyarakat serta semakin meningkatkan pula kesadaran masyarakat dalam menunaikan rukun Islam yang kelima ini. Di samping itu, prosedur daripada kebijaksanaan, yang ditempuh oleh pemerintah dalam melancarkan urusan haji semakin mudah dirasakan oleh masyarakat.

C. K e s e h a t a n

Pelaksanaan pembangunan di bidang kesehatan dititikberatkan pada usaha memberikan kesempatan yang lebih luas bagi setiap warga negara guna mendapatkan derajat kesehatan yang juga merupakan salah satu perwujudan daripada usaha mencapai keadilan sosial.

Guna mencapai tujuan tersebut sejauh mungkin, maka Pemerintah Daerah menentukan beberapa langkah dan usaha, antara lain yaitu :

- Tersedianya sarana dan tenaga pelayanan yang sejauh mungkin memenuhi kebutuhan masyarakat.

- Pengurangan jumlah penderita penyakit dan menekan timbulnya wabah penyakit sampai serendah mungkin.
- Peningkatan dan perbaikan gizi.
- Tersedianya sarana sanitasi dan perkembangan kesadaran masyarakat untuk hidup sehat.
- Perkembangan keluarga berencana.

Sebagai landasan dari usaha untuk mencapai tujuan tersebut, telah ditetapkan beberapa kebijaksanaan umum, yaitu :

1. Mengutamakan pelayanan kesehatan kepada penduduk pedesaan dan daerah-daerah pusat kegiatan pembangunan.
2. Pelayanan kesehatan terutama dikerahkan bagi golongan tenaga muda dan tenaga produktif.
3. Pelayanan kesehatan yang diprioritaskan adalah pengobatan jalan.
4. Dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan, diutamakan usaha pelayanan preventif.¹⁸⁾

Perhatian pemerintah terhadap masalah kesehatan tentunya sangat beralasan, dimana kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Dengan adanya berbagai usaha dibidang kesehatan diharapkan masyarakat dapat dan mampu hidup sehat sehingga dapat melaksanakan aktifitasnya

¹⁸⁾ *Ibid*, hal. 186.

dengan baik.

Berikut ini akan diuraikan beberapa usaha operasional dalam menunjang perkembangan bidang kesehatan semasa pemerintahan Haji Andi Made AliE.

1. Pengembangan Puskesmas dan Rumah Sakit

Puskesmas dan rumah sakit mendapat perhatian khusus jika dibandingkan dengan masa sebelum adanya Pelita. Pengembangan Puskesmas dan Rumah Sakit sangat jelas sekali, baik dalam kuantitas sarana pelayanan kesehatan yang didukung dengan berbagai perlengkapan dan tenaga medis. Sampai pada akhir masa jabatan Haji Andi Made AliE, telah terdapat sebuah Rumah Sakit Umum (RSU), Puskesmas 5 buah, Puskesmas Pembantu 16 buah, B.K.I.A 22 buah, Balai Pengobatan 34 buah dan Pos kesehatan 9 buah.

Untuk meningkatkan sarana pelayanan kesehatan, RSU Watansoppeng dilengkapi dengan berbagai peralatan medis dan pada tahun 1977 diadakan pemugaran dan perbaikan serta penambahan kamar. Dengan demikian, jenis penyakit yang dapat dilayani juga semakin banyak.

Dalam hal pelayanan, ditempuh sistem Referral (rujukan). Artinya, penderita yang tidak dapat dilayani di Puskesmas harus dikirim secepatnya ke RSU Watansoppeng. Demikian pula yang tidak dapat dilayani di RSU Watansoppeng dikirim secepatnya ke rumah sakit Propinsi (Ujung Pandang). Dengan sistem ini, maka pelayanan

kesehatan terhadap seorang penderita/pasien tidak akan berhenti pada suatu tempat saja. Selain sistem tersebut, juga dibentuk Team Medis Keliling yang secara reguler mengunjungi desa-desa. Dengan cara ini masyarakat atau penderita penyakit secara langsung dapat diperiksa oleh Team Medis. Hal ini pulalah yang membuktikan bahwa usaha perluasan dan pemerataan pelayanan kesehatan senantiasa diusahakan sampai ke desa-desa.

2. Peningkatan Pengetahuan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan pengetahuan masyarakat akan kesehatan. Pemerintah Daerah Tingkat II Soppeng menetapkan Kecamatan Marioriawa sebagai daerah intensif kerja penyuluhan kesehatan kepada masyarakat. Dalam kegiatan ini diadakan pertemuan-pertemuan berkala dan lokakarya mini dengan melibatkan seluruh pemuka masyarakat.

Sedangkan untuk peningkatan pengetahuan kesehatan di sekolah, dilakukan melalui pembinaan Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) dan sampai pada akhir masa pemerintahan Haji Andi Made AliE, seluruh sekolah yang ada di Kabupaten Soppeng telah dibina. Bahkan melalui UKS, diadakan pemeriksaan dan pengobatan ringan kepada murid sekolah dan kursus bagi guru-guru. Di samping itu, kepada sekolah-sekolah diberikan obat-obatan sehingga dengan cara ini

guru-guru yang bersangkutan dapat secara langsung memberikan pertolongan kepada murid-muridnya.

3. Pembudayaan Keluarga Berencana

Dalam usaha pematapan dan pembudayaan program Keluarga Berencana (KB), maka dibentuklah Pos KB Desa di Kecamatan Marioriwawo dan Kecamatan Lilirilau. Dengan adanya pos-pos KB tersebut, diharapkan kemantapan seorang akseptor KB dapat lebih terjamin. Program pembudayaan KB ini secara nasional baru dimulai pada tahun 1974 dan sampai berakhirnya masa jabatan Haji Andi Made AliE, telah dicapai jumlah akseptor KB yang cukup banyak di Kabupaten Soppeng.¹⁹⁾

4. Pengadaan Air Bersih

Di bidang peningkatan pengadaan air bersih khususnya untuk memenuhi kebutuhan warga kota, Pemerintah Daerah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam pengadaannya dengan mengalirkan air melalui dua jalur pipa dari pusat mata air di PanyilangE, sejauh 6,7 Km sebelah barat kota Watansoppeng dan membangun empat buah bak air. Di samping itu, Pemandian Ompo yang sejauh 4 Km dari pusat kota, pada tahun 1965 hanya mampu mengalirkan puluhan meter kubik per detik dan berkat usaha pemerintah, maka

¹⁹⁾ H. Abu Bakar Kadir, BA : Wawancara, 10 April 1997, Watansoppeng.

pada akhir masa jabatan Haji Andi Made AliE telah mampu mengalirkan air ribuan meter kubik per detik.

Demikian pula halnya dengan pengadaan air bersih di desa-desa dengan sistem perpipaan seperti di Tajuncu desa Donri-Donri yang telah dinikmati oleh masyarakat setempat sejak tahun 1977. Sedangkan pengadaan air bersih dengan sistem perpipaan di Desa Tetewatu dan Abbanuangge Kecamatan Lilirilau, sampai pada akhir jabatan Haji Andi Made AliE belum terealisasi sepenuhnya, walaupun pembuatan bak air dan pemasangan pipanya telah rampung. ²⁰⁾

Selain pengadaan air bersih dengan sistem perpipaan tersebut, usaha pengadaan air bersih juga dilakukan dengan cara pembuatan sumur umum di tempat-tempat tertentu serta dengan bantuan pompa air.

d. Kebudayaan

Pembinaan kebudayaan di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng dimaksudkan untuk membina dan melestarikan kebudayaan daerah yang memberi corak kepada kebudayaan nasional dan memelihara kebudayaan nasional sebagai warisan budaya menuju kepribadian bangsa.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka selama Pelita II dilakukan berbagai usaha, di antaranya yaitu:

- Pendidikan kesenian dengan jalan pengadaan guru-guru se-

²⁰⁾ Memori Haji Andi Made AliE (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng tahun 1965-1979), hal.9.

ni (tari dan musik) sebagai pelaksana dan pendidik seni serta mengadakan kursus-kursus.

- Pembinaan kesenian dengan jalan melakukan inventarisasi kesenian yang ada dan mengadakan kegiatan-kegiatan kesenian.
- Melakukan peninjauan dan penyuluhan tentang kesenian ke segenap kecamatan dan desa.
- memberikan bimbingan dan bantuan-bantuan kepada Institut Kesenian Sulawesi (IKS) Cabang Soppeng dan group Qasidah Rabana dalam pengembangannya.
- Menginventarisasi benda-benda dan lokasi purbakala serta memberikan partisipasi kepada Lembaga Purbakala dalam rangka pemugaran kuburan tua "Jera' LompoE" di Watansoppeng.²¹⁾

Dengan melakukan berbagai usaha tersebut, maka kebudayaan daerah yang merupakan ciri khas tersendiri pada masyarakat Soppeng senantiasa terjaga kelestariannya dari generasi ke generasi yang tentunya diharapkan akan menambah keanekaragaman kebudayaan bangsa dan memperkaya kebudayaan nasional.

3. Bidang Politik

Bahwa pembangunan politik tidak dapat dipisahkan dari pembangunan di bidang ekonomi dan sosial budaya. Ketiganya

²¹⁾ *Ibid*, hal. 186.

mempunyai hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi. Pembangunan politik merupakan usaha pemeliharaan dan peningkatan stabilitas politik. Stabilitas politik sangat diperlukan dalam usaha menciptakan stabilitas nasional. Stabilitas nasional akan memperkuat kehidupan konsitusional dan ketahanan nasional. Hasil pembangunan ekonomi dan sosial budaya yang telah dicapai sampai sekarang ini berpengaruh besar terhadap usaha mewujudkan stabilitas nasional itu.

Penciptaan stabilitas politik dalam rangka kebijaksanaan nasional telah memungkinkan pelaksanaan Pemilu tahun 1971 dan 1977. Demikianlah halnya pada pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng yang berlangsung dengan tertib dan aman. Iklim ini pulalah yang memperlancar pelaksanaan fusi partai politik tanpa menimbulkan hambatan yang berarti. Stabilitas politik yang demikian pula yang memungkinkan pertumbuhan kehidupan demokrasi yang makin sehat dan dewasa.

Terciptanya stabilitas politik di kabuapten Soppeng pada masa pemerintahan Haji Andi Made AliE tentunya berkat berbagai usaha nyata dalam pembangunan di bidang politik. Adapun usaha-usaha nyata yang dimaksud, di antaranya akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Pemerintahan.

Dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng, yang pertama-tama menjadi perhatian utama Haji Andi Made AliE adalah masalah pemerintahan atau ketertiban. Untuk melaksanakan hal tersebut dengan sebaik-baiknya maka Bupati bersama seluruh aparat memulai dengan tekad dan usaha mengembalikan kepercayaan rakyat kepada pemerintah. Usaha ini sangat penting karena merupakan salah satu unsur utama dan mutlak dalam menunjang tercapainya tujuan pembangunan.

Berkat bantuan dan kerja sama dengan para Anggota Muspida Tingkat II Soppeng serta para Kepala Jawatan/Dinas/Instansi dengan mendapat dukungan dan partisipasi penuh rakyat yang telah mempercayai itikad baik dari Pemerintah, maka kestabilan politik pemerintahan atau ketertiban yang dinamis senantiasa dapat berjalan dengan baik. Kondisi yang demikian pula yang memungkinkan Pemerintah dan masyarakat dapat melaksanakan pembangunan di berbagai bidang dan memungkinkan mengelolah dana investasi yang cukup besar pada Pelita I dan Pelita II.

Di samping itu, dalam menjaga kestabilan pemerintahan ini maka senantiasa diusahakan pula peningkatan kemampuan dan pendayagunaan aparat pemerintah Daerah. Dalam hal ini para pegawai diberi kesempatan untuk mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi maupun kursus-kursus atau penataran

serta mutasi atau penyegaran pegawai menurut kebutuhan dalam rangka efisiensi dan efektifitas kerja. ²²⁾

b. Perkembangan dan Pelaksanaan Fusi Partai Politik

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)

Partai politik ini tumbuh dan berkembang sejak tanggal 28 September 1952 yaitu sebelum Soppeng berdirinya sendiri sebagai daerah otonom. Pada tahun enam puluhan Parpol ini besar sekali pengaruhnya khususnya sebelum meletus pemberontakan PKI pada tahun 1965.

Dalam tahun 1965, keuletan taktik parpol ini mulai surut akibat pengaruh dan saingan dari parpol lainnya yang sudah ada serta terjadinya perpecahan di dalam tubuh partai. Hal inilah yang mengakibatkan banyak anggotanya yang berada di Kabuapten Daerah Tingkat II Soppeng langsung mengundurkan diri dan ada pula yang masuk ke parpol lainnya. ²³⁾ Di samping itu, pada tahun 1970 muncul pula suatu wadah KOKARMENDAGRI yang menghendaki monoloyalitas Pegawai Negeri sehingga pengurus PNI yang berstatus Pegawai negeri terpaksa banyak mengundurkan diri.

Walaupun demikian, menjelang Pemilu tahun 1971 PNI

²²⁾ *Ibid*, hal. 4.

²³⁾ H. Abu Bakar Kadir, BA : Wawancara, 10 April 1997, Watan Soppeng.

masih tetap kelihatan aktif dalam kegiatan kampanye. Setelah perhitungan suara hasil Pemilu ternyata PNI tidak berhasil mendapatkan kursi dalam keanggotaan DPRD Tingkat II Soppeng.²⁴⁾

2. Partai Kristen Indonesia (PARKINDO)

Parkindo mulai tumbuh di Kabu ten Daerah Tingkat II Soppeng sejak tanggal 17 Januari 1954. pengaruh dan perkembangannya sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan agama Kristen di daerah ini dan pengurusnya terdiri dari orang-orang swasta serta beberapa orang pegawai negeri.

Menjelang Pemilu tahun 1971, Pegawai Negeri diajarkan untuk mengeluarkan pernyataan monoloyalitas KOKARMENDAGRI dan KOKAR-KOKAR jawatan/Dinas sehingga seluruh anggota Parkindo yang berstatus Pegawai Negeri langsung mengundurkan diri dan sekaligus masuk GOLKAR sebagai wadah penyalur aspirasi KOKARMENDAGRI dan KOKAR-KOKAR lainnya pada waktu itu. Pada Pemilu tahun 1971 Parkindo tidak dapat meraih kursi dalam keanggotaan DPRD Tingkat II Soppeng.²⁵⁾

3. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia (IPKI)

Partai Politik ini tumbuh dan berkembang sejak

²⁴⁾ Memori Haji Andi Made AliE (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng tahun 1965-1979), hal. 93.

²⁵⁾ Ibid, hal. 94.

tanggal 17 April 1954 dan kebanyakan pengurusnya adalah Pegawai Negeri. Dalam periode tahun 1965-1971, IPKI mempunyai anggota dan pendukung serta simpatisan yang cukup besar dan tersebar di pelosok kecamatan dari kalangan tokoh-tokoh masyarakat (informal leader), pegawai negeri dan kalangan pemda/mahasiswa yang tergabung dalam Pemuda Pancasila dan Mahasiswa Pancasila (Mapnacas) serta Tani Pancasila.

Setelah adanya anjuran monoloyalitas Pegawai Negeri menjelang Pemilu tahun 1971, sebagian pengurusnya langsung mengundurkan diri. Walaupun demikian, IPKI dapat merebut satu kursi di DPRD Tingkat II Soppeng. Hal ini sudah diperkirakan sebelumnya karena pada saat kampanye Pemilu, Parpol ini cukup menonjol jika dibandingkan dengan parpol lainnya. Di samping itu juga karena pendiri parpol ini berasal dari orang-orang yang mempunyai kedudukan penting dan menentukan dalam kehidupan kemasyarakatan atau tradisi daerah.

4. Partai Nahdatul Ulama (NU)

Partai NU mulai tumbuh dan berkembang di Daerah Tingkat II Soppeng sejak tanggal 1 Nopember 1964. Pendukung dan anggota utama partai ini adalah para ulama dan tokoh-tokoh Islam yang berstatus Pegawai Negeri dan cukup fanatik serta radikal dalam perjuangan partai. Pada tahun 1970 partai ini tetap terkonsolidasi dengan baik,

sekalipun sudah ada anjuran bagi Pegawai Negeri yang¹⁷⁴ memasuki salah satu parpol. bahkan dari tahun 1965 sampai dengan tahun 1971 Partai NU mempunyai anggota terbanyak dibandingkan dengan seluruh parpol lainnya yang ada di Daerah Tingkat II Soppeng.

Menjelang Pemilu tahun 1971, partai NU Daerah Tingkat II Soppeng cukup bersemangat dalam melaksanakan kampanyenya dengan menggunakan seluruh kekuatan ormasnya. Setelah perhitungan suara hasil pemilu ternyata Partai NU berhasil mendapatkan satu kursi dalam keanggotaan DPRD Tingkat II Soppeng.²⁶⁾

5. Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)

PSII tumbuh dan berkembang di Daerah Tingkat II Soppeng sejak tanggal 17 Juni 1950. Pada tahun 1969 dan menjelang Pemilu tahun 1971, para pengurus partai ini masih terkonsolidasi dengan baik, kecuali beberapa orang pimpinan yang berstatus Pegawai Negeri telah menyatakan monoloyalitasnya. PSII tidak berhasil mendapatkan kursi keanggotaan DPRD Tingkat II Soppeng pada Pemilu tahun 1971.

6. Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI)

PARMUSI tumbuh dan berkembang di Daerah Tingkat II Soppeng sejak tanggal 26 Mei 1968. Pengurus parpol ini

26) Memori DPRD Tingkat II Soppeng Periode 1987-1992, hal. 41.

sebagian besar adalah tokoh-tokoh agama, Pegawai Negeri dan swasta yang berkeyakinan Islam. Ketika adanya anjuran monoloyalitas masih ada pengurusnya belum menyatakan monoloyalitasnya. Bahkan ada yang sampai duduk dalam DPRD Tingkat II Soppeng hasil Pemilu tahun 1971, di mana partai ini menempati urutan ke empat dari jumlah suara yang ada dan berhasil mendapatkan satu kursi di DPRD Tingkat I Soppeng.

7. Partai Islam (PI-PERTI)

Partai Islam tumbuh dan berkembang di Daerah Tingkat II Soppeng sejak tanggal 18 Nopember 1965. Setelah adanya anjuran monoloyalitas pada tahun 1970, para pengurusnya yang berstatus pegawai negeri pada umumnya langsung mengundurkan diri. Pada Pemilu tahun 1971, parpol ini tidak memperoleh kursi dalam keanggotaan DPRD Tingkat Iin Soppeng.²⁷⁾

8. Partai Murba

Partai Murba pernah akan tumbuh di Daerah Tingkat II Soppeng, namun karena kurang pendukung dan ketiadaan anggota maka partai politik ini tidak pernah tumbuh.

Demikianlah keadaan atau perkembangan Partai Politik yang ada di Kabupaten Soppeng samapi dengan tahun 1971, yang senantiasa mendapat dukungan dan pembinaan dari

²⁷⁾ *Ibid.*

pemerintah dengan tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Pada tahun 1972, sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri untuk segera melaksanakan Fusi Partai Politik di daerah-daerah, maka dengan segera Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan memberikan pula instruksi kepada para Dupati Kepala Daerah Tingkat II se-Sulawesi Selatan untuk sesegera mungkin melaksanakan fusi tersebut.

Pelaksanaan fusi Partai Politik di Daerah Tingkat II Soppeng tidak mengalami kesulitan yang berarti karena para pimpinan Parpol yang ada cukup mengerti dan memahaminya setelah diadakan pendekatan (approach) kekeluargaan dengan menitikberatkan tentang pelaksanaan Demokrasi Pancasila dalam rangka mensukseskan pembangunan daerah. Di samping itu, juga memberikan pengertian bahwa manfaat pembangunan dititikberatkan bagi umat Islam pada khususnya dan seluruh lapisan masyarakat pada umumnya.

Adapun Partai Politik yang ada di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng seperti yang terdapat di daerah-daerah lain di seluruh Indonesia, yaitu sebagai berikut:

1. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

PPP berdiri dan berkembang di Kabuapten Daerah Tingkat II Soppeng sejak tahun 1972. kepengurusan parpol ini didominasi oleh mantan tokoh-tokoh Partai NU dan PARMUSI.

Menjelang Pemilu tahun 1977, partai ini memperlihatkan peningkatan programnya yang begitu gigih dalam memperluas pengaruhnya di kecamatan-kecamatan dan desa-desa secara tertutup. Cara memperluas pengaruhnya tersebut ditempuh dengan jalan masing-masing pengurus atau anggota mengunjungi keluarga mereka yang ada di desa serta kunjungan secara tertutup dari rumah ke rumah.

Berkat usaha yang gigih dari pengurus atau anggota partai tersebut, maka dalam Pemilu tahun 1977 PPP berhasil memperoleh dua kursi dalam keanggotaan DPRD Tingkat II Soppeng untuk masa bhakti 1977-1982.²⁸⁾

2. Partai Demokrasi Indonesia (PDI)

PDI berdiri dan berkembang di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng sejak tahun 1972. Kepengurusan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) parpol ini pada umumnya dipegang oleh mantan tokoh-tokoh Partai IPKI yang terdiri dari orang-orang swasta seluruhnya. Sedangkan anggota-anggota partai lainnya yang berfusi dengan Partai Demokrasi Indonesia, pada umumnya menyatakan diri keluar dari partainya dan langsung masuk Golkar.

Dengan keadaan demikian serta berbagai faktor, maka pada Pemilu 1977, PDI tidak mampu mendapatkan kursi dalam keanggotaan DPRD Tingkat II Soppeng.

²⁸⁾ *Ibid*, hal. 42.

c. Perkembangan Golongan Karya.

Golkar mulai tumbuh dan berkembang di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng sejak awal tahun 1970. Pada awalnya Golkar langsung mengadakan penggalangan dan menanamkan pengaruhnya dengan saling pengertian dari semua unsur-unsur Pemerintah Daerah, jawatan/Dinas dan Instansi-Instansi lain yang lebih dahulu mengerti maksud dan tujuan pembentukan wadah ini.

Pernyataan monoloyalitas KOKARMENDAGRI khusus bagi pegawai negeri yang bekerja dalam lingkungan Departemen Dalam Negeri pada tahun 1970 sangat menunjang kekompakan dan pertumbuhan Golkar di mana-mana dalam wilayah Daerah Tingkat II Soppeng. Bahkan kepengurusan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng yang relatif masih baru, sangat kompak dalam melaksanakan seluruh program Golkar dengan tetap mempertahankan Golkar sebagai "Agent for Development" di samping memperlihatkan andilnya dalam merintis seluruh kegiatan Pembangunan Daerah.

Pembentukan Kokar-Kokar jawatan/Dinas, baik di tingkat Kabupaten maupun di tingkat Kecamatan digiatkan terus dan tetap memantapkan disiplin kerja dengan tujuan agar mereka benar-benar memperlihatkan loyalitas terhadap tugas dan pekerjaan yang dibebankan padanya. Dengan adanya anjuran monoloyalitas pula sehingga Pegawai-pegawai negeri

yang menjadi Pimpinan atau anggota Parpol pada umumnya secara terbuka menyatakan diri keluar dan langsung masuk Golkar. Hal ini pula yang menjadi alat penggalang terdepan dalam masyarakat sehingga seluruh usaha dan kegiatan Golkar dalam memperluas pengaruhnya mendapat tanggapan positif dari masyarakat. Di samping itu, pengaruh pendekatan (approach) kekeluargaan pun tidak luput dilakukan oleh semua unsur-unsur penggalang Golkar dalam memperluas pengaruhnya sehingga masyarakat dengan tidak ada paksaan memasuki Golkar.²⁹⁾

Dengan bertitik tolak pada berbagai usaha penggalangan massa atau anggota yang mantap tersebut, maka program Golkar mendapat sambutan seluruh masyarakat Kabupaten Soppeng dan ini dibuktikan dengan kemenangan mutlak Golkar pada Pemilu tahun 1971 dengan mendapatkan 17 kursi dari 25 kursi dalam keanggotaan DPRD Tingkat II Soppeng.³⁰⁾

Kemenangan mutlak Golkar pada Pemilu tahun 1971 tersebut, merupakan modal pertama dan landasan titik tolak dalam mempertahankan posisinya serta teknik penggalangan anggota menjelang Pemilu tahun 1977. Di samping itu,

²⁹⁾ Drs. T. Hamaluddin : Wawancara, 5 April 1997, Watansoppeng.

³⁰⁾ Memori DPRD Tingkat II Soppeng Periode 1987-1992, hal 41.

memudahkan ruang gerak Golkar lebih luas lagi berhubung karena hanya menghadapi 2 (dua) tantangan sebagai kawan bermain dalam Pemilu tahun 1977.

Berdasarkan pada faktor-faktor tersebut, Golkar senantiasa melanjutkan dan meningkatkan segala programnya antara lain dengan pemantapan loyalitas, dedikasi dan pengabdian KORPRI yang mulai dirintis sejak bulan Mei 1972 (pembentukan Dewan Pembina KORPRI Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng) dan merangkul para informal Leader sehingga masyarakat yang patuh kepadanya secara langsung masuk Golkar.

Keberhasilan dari usaha-usaha dan program yang mantap seperti yang telah dikemukakan di atas terbukti dengan kemenangan mutlak Golkar pada Pemilu tahun 1977, di mana Golkar berhasil meraih 17 kursi dari 23 kursi dalam keanggotaan DPRD Tingkat II Soppeng.³¹⁾

d. Pembinaan Organisasi-organisasi

Di samping pembinaan terhadap Partai Politik dan Golongan Karya (Golkar), pembinaan terhadap organisasi kepemudaan, pelajar, organisasi fungsional/profesi dan organisasi-organisasi lembaga sosial lainnya, senantiasa mendapat perhatian pula dari Pemerintah Daerah.

Pembinaan generasi muda ditempuh dengan mengarahkan

³¹⁾ Ibid, hal. 42.

mereka menilai secara bebas berbagai masalah di dalam masyarakat agar mereka dapat berorientasi pada pembangunan yang sementara dilaksanakan. Usaha pembinaan generasi muda ini disatukan dalam organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang mencerminkan unsur-unsur pemuda, mahasiswa dan eksponen Angkatan 66 di Kabupaten Soppeng. Langkah selanjutnya adalah pembentukan kelompok kerja KNPI masing-masing di Kecamatan. Dengan pembinaan terhadap organisasi KNPI ini, para anggotanya diharapkan dapat lebih matang dan mantap sehingga pada suatu waktu mereka siap untuk turut serta memikul tanggung jawab dalam pembangunan.

Pembinaan terhadap pelajar dilaksanakan melalui Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS). Dengan adanya pembinaan terhadap OSIS ini, diharapkan penyalahgunaan massa pelajar untuk tujuan politik dapat dihindarkan.

Pembinaan terhadap pegawai negeri dilaksanakan melalui pemantapan organisasi Korps Pegawai Negeri Indonesia sebagai satu-satunya wadah bagi pegawai negeri diluar kedinasan. Pembinaan KORPRI yang terorganisir sampai ke desa-desa diarahkan kepada pemantapan kesetiaan dan ketaatan penuh kepada Pemerintah dan Negara dalam usaha menjadikan pegawai negeri sebagai kekuatan pokok dalam menyukseskan pembangunan. Terhadap istri pegawai negeri pun dilakukan pembinaan melalui wadah organisasi

Dharma Wanita. Pembinaan ini diarahkan untuk memberikan dorongan moril kepada suami-suami mereka selaku pegawai negeri untuk meningkatkan prestasi kerja dalam menunjang pembangunan.

Pembinaan terhadap golongan fungsional/profesi diarahkan pada pembentukan wadah-wadah yang bersifat profesi. Prioritas diletakkan pada pembinaan organisasi massa yang peka terhadap motivasi dan agitasi politik seperti kaum buruh, tani, nelayan dan lain sebagainya.

Pada umumnya organisasi fungsional/profesi di Kabuapten Daerah Tingkat II Soppeng baru mulai tumbuh pada tahun 1974. Organisasi yang berhasil dibentuk di antaranya yaitu Federasi Buruh Seluruh Indonesia (FBSI) dan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI). Pada awalnya, organisasi yang telah terbentuk masih dalam taraf menyesuaikan struktur organisasinya masing-masing dengan struktur organisasi induknya di Pusat serta memulai pengarahannya program kerjanya ke seluruh kecamatan dan desa-desa.

Pada tahun 1975, Pemerintah Daerah telah memberikan dukungan dan pembinaan terus-menerus. Seluruh organisasi yang ada sudah bekerja sesuai dengan profesinya masing-masing dan pada umumnya masing-masing pengurus sudah mengikuti penataran-penataran, seminar-seminar atau raker yang diadakan oleh organisasi induknya di tingkat I.

Dalam melaksanakan program kerjanya, seluruh organisasi senantiasa senada dan sejalan dengan apa yang dikehendaki oleh pemerintah serta tetap disesuaikan dengan maksud dan tujuan pembentukannya. Hal ini dimungkinkan karena pada umumnya pimpinan dan pengurus organisasi tersebut adalah pegawai negeri, bahkan kebanyakan adalah pejabat-pejabat sehingga mereka cepat mengetahui apa yang menjadi keinginan pemerintah.³²⁾

Segala usaha dan kegiatan-kegiatan organisasi cukup diandalkan berpartisipasi aktif dalam mensukseskan seluruh program pemerintah dalam pembangunan. Di samping itu, kekompakan organisasi yang mantap turut menunjang suksesnya Pemilu tahun 1977.

e. Ke a m a n a n

Sektor keamanan ini meliputi pembinaan ketertiban umum dan pengamanan masalah G.30S/PKI. Pembinaan ketertiban umum bertujuan untuk mencegah goyahnya sendi-sendi kehidupan sosial dalam masyarakat. Oleh karena itu, sasaran utama adalah menciptakan kondisi di mana masyarakat mempunyai tanggung jawab dan disiplin soisal yang baik. Dengan demikian akan terwujud ketetraman bagi setiap warga masyarakat dan terpeliharanya ketertiban dalam pergaulan masyarakat.

³²⁾ H. Abu Bakar Kadir, BA : Wawancara, 10 April 1997, Watansoppeng.

Untuk mewujudkan keadaan yang demikian, pemerintah daerah tingkat II Soppeng dengan berdasarkan pada Undang-Undang No. 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok pemerintah di daerah, senantiasa membina keamanan dan ketertiban masyarakat (KAMTIBMAS) yang telah ditetapkan dan ditempuh dengan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh. Hal tersebut disebabkan karena tidak semua alat atau perangkat operasional pembinaan keretiban umum ini berada langsung dibawah Bupati Kepala Daerah, seperti Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) dan Kejaksaan.

Penanggulangan aspek ketertiban dititikberatkan pada usaha peningkatan kesadaran hukum masyarakat. Usaha ini dilakukan dalam bentuk penindakan hukum dan penerangan atau penyluhan-penyuluhan hukum. Dengan usaha tersebut maka segala tindakan atau hal-hal yang dapat merusak sendi-sendi kehidupan sosial masyarakat dan kelangusngan pembangunan dapat dicegah dan diatasi dengan sebaik-baiknya. Hal tersebut pula yang menjamin adanya kepastian hukum, rasa aman serta kesadaran dan kedisiplinan masyarakat sehingga tercipta kondisi ketertiban umum yang baik dalam menunjang kelancaran pembangunan.

Selanjutnya dalam hal penanggulangan masalah G.30.s/PKI yang sejalan dengan adanya tindakan penangkapan dan penahanan oknum-oknum yang terlibat G.30 S/PKI di mana-mana di seluruh pelosok tanah air, maka di Kabupaten

Soppeng juga tidak ketinggalan melaksanakan hal tersebut. Tindakan ini dimulai sejak tanggal 5 Oktober 1965, serangkaian dengan peringatan Hari Ulang Tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang ke-20. Seluruh kekuatan ABRI dan unsur-unsur pengamanan lainnya dikerahkan ke seluruh penjuru Wilayah Kabupaten Soppeng, utamanya unsur-unsur Security Intel dari kalangan ABRI dan pemerintah daerah serta Direktorat Sosial Politik dan Kejaksaan Negeri.

Seluruh anggota-anggota PKI yang sempat diketahui segera diadakan penangkapan dan pengamanan sebagai tindakan preventif dan represif kemudian diajukan kepada Team Pemeriksa Daerah (TEPERDA) untuk diusut dan dilanjutkan ke Laksus Pangkoptibda Sulselra untuk diterbitkan surat keputusan klasifikasinya. Tindakan Preventif ini berjalan terus dan dilaksanakan serba tertutup sepanjang hal itu belum jelas faktanya.

Adapun mengenai jumlah tahanan G.30 S/PKI golongan C di tiap kecamatan dalam wilayah Kabupaten Soppeng sampai akhir masa jabatan Haji Andi Made AliE, yaitu sebagai berikut :

- Kecamatan Lalabata sebanyak 21 orang
- Kecamatan Lilirilau sebanyak 125 orang
- Kecamatan Liliriaja sebanyak 74 orang
- Kecamatan Marioriwawo sebanyak 92 orang

- Kecamatan Marioriaawa sebanyak 10 orang
- Perwakilan Kecamatan Lalabata (sekarang Kecamatan Donri-Donri) sebanyak 37 orang.³³⁾

Kepada seluruh bekas tahanan G.30 S/PKI yang dikembalikan ke masyarakat, Pemerintah Daerah senantiasa membina mereka dengan menggunakan segala jalur yang ada. Diantaranya yaitu dengan penerangan agama, penempahan mental dengan jalan menepkan penghayatan ideologi Negara Pancasila yang membuat mereka benar-benar sadar sebagai Warga Negara Republik Indonesia yang baik dan bertanggungjawab.

Suatu hal yang perlu dikemukakan pula bahwa salah satu partai politik yaitu Partai Indonesia (PARTINDO) yang aksesnya juga sampai di daerah Soppeng setelah meletusnya G.30 S/PKI, telah dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik. PARTINDO menyatakan diri bubar di seluruh wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng.

³³⁾ Memori Haji Andi Made AliE (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng tahun 1965-1979), hal 110.

BAB V

KESIMPULAN

Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng adalah salah satu dari 23 Kabupaten dan Kotamadya yang ada di Propinsi Sulawesi Selatan. Pada mulanya, Soppeng adalah sebuah Kerajaan yang memiliki sistem atau struktur pemerintahan tersendiri di antara kerajaan-kerajaan yang ada di Sulawesi Selatan. Namun setelah penjajah Belanda datang dan disusul oleh Jepang, maka kerajaan Soppeng berada di bawah kekuasaan penjajah walaupun pemerintahan tetap di pegang oleh Raja (Datu) Soppeng. Pada masa itu, Soppeng merupakan Onderafdeeling dari Afdeeling Bone. Setelah Indonesia merdeka dan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia, daerah Soppeng masih merupakan bagian dari daerah Swatantra Tingkat II Bone. Pada akhirnya, daerah Soppeng resmi menjadi daerah otonom pada tahun 1957 dengan nama *Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng*.

Sampai sekarang ini, Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng telah mengalami perkembangan dalam berbagai bidang. Perkembangan yang terjadi ini berkat usaha dan kerja keras Pemerintah Daerah bersama seluruh lapisan masyarakat dalam melaksanakan berbagai program pembangunan. Setiap Bupati yang memerintah mempunyai etos kerja dan mampu melahirkan gagasan besar yang pada

gilirannya tetap memperkokoh persatuan dan kesatuan rakyatnya menuju pencapaian pembangunan demi terwujudnya masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Dalam hal tersebut, pelaksanaan pembangunan merupakan tanggung jawab bersama antara Pemerintah Daerah dan aparatnya beserta masyarakat, dimana pemerintah senantiasa memberikan pengarahannya, bimbingan dan motivasi serta senantiasa berusaha menciptakan iklim yang sehat dalam mengikutsertakan masyarakat turut berpartisipasi dalam setiap bidang pembangunan.

Demikianlah halnya Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng pada masa pemerintahan Haji Andi Made AliE (1965-1979) yang merupakan tokoh keempat di antara beberapa tokoh yang pernah menjabat sebagai Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng. Pada masa pemerintahan beliau, Soppeng mengalami banyak perkembangan dalam berbagai bidang pembangunan walaupun bangsa Indonesia pada waktu itu yaitu pada tahun 1966, baru memasuki babak baru yang dikenal dengan nama Orde Baru.

Pelaksanaan tugas dan tanggung-jawab Bupati Haji Andi Made AliE selama kurang lebih 14 tahun tersebut telah dimanfaatkan sebaik-baiknya dengan melakukan berbagai usaha dan langkah nyata yang

berkesinambungan dalam memanfaatkan dan mendayagunakan segala potensi yang dimiliki Daerah Soppeng.

Dengan kebijaksanaan pembangunan yang bertitik tolak dari Desa ke Kota, berbagai program pembangunan dalam bidang ekonomi, sosial budaya dan politik telah membawa masyarakat Soppeng ikut berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan pembangunan dan mencapai masyarakat yang lebih maju, teratur dan sejahtera yang sejajar dengan daerah-daerah lain yang ada di Sulawesi Selatan.

Keberhasilan itupun diakui oleh Pemerintah Pusat, dimana pada tahun 1979 Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng berhasil memperoleh penghargaan *Pataka Parasamya Purna Karya Nugraha*, sebagai daerah yang dianggap paling maju dalam melaksanakan serta meningkatkan pembangunan di segala bidang untuk suatu tahap Pelita. Di samping itu, Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng telah berhasil meraih berbagai prestasi dan penghargaan di tingkat Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan, utamanya dalam hal pembangunan pedesaan.

Dengan demikian, Haji Andi Made AliE merupakan peletak dasar pembangunan di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng pada masa Orde Baru dan tidaklah berlebihan apabila dikatakan bahwa beliau telah meninggalkan kenangan yang sangat berharga bagi seluruh masyarakat Soppeng.

Demikianlah yang dapat penulis kemukakan dan disadari sepenuhnya bahwa tulisan ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, diperlukan usaha pengkajian atau penelitian yang berkelanjutan mengenai keadaan ekonomi, sosial budaya dan politik di Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng pada masa pemerintahan Haji Andi Made AliE.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdullah, Taufik. 1985. *Sejarah Lokal di Indonesia*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Baco, Salam. 1995. *Soppeng dari Kerajaan Menjadi Kabupaten*. Watansoppeng : Tanpa penerbit.

Daeng Patunru, Abdul Razak. 1969. *Sejarah Ringkas Kerajaan Soppeng. Ujung Pandang* : Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan.

Departemen Dalam Negeri Propinsi Sulawesi Selatan. 1991 *Sejarah Perkembangan Pemerintahan di Sulawesi Selatan*. Ujung pandang : Tanpa penerbit.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1989. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka.

Gottschalk, Louis. 1986. *Mengerti Sejarah*. Dialihbahasakan oleh Nugroho Notosusanto. Jakarta : Universitas Indonesia Press.

Hugiono dan P.K. Poerwantana. 1992. *Pengantar Ilmu Sejarah*. Jakarta : Rineka Cipta.

Kantor Statistik Soppeng. 1997. *Publikasi Statistik Penduduk*. Watansoppeng : Tanpa penerbit.

Kartodirdjo, Sartono. 1993. *Pendekatan Ilmu Sosial Dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Lubis, M. Solly. 1983. *Pergeseran Garis Politik dan Perundang-Undangan Mengenai Pemerintahan Daerah*. Bandung : Alumni.

Musa, Adam. 1982. *Kedatangan Agama Islam di Kabupaten Soppeng*. Watansoppeng : Seksi Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.

Hamid, Pananrangi. 1991. *Sejarah Kabupaten Daerah Tingkat II Soppeng*. Ujung Pandang : Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional.

Recklefs, M.C. 1992. *Sejarah Indonesia Modern*. Dialihbahasakan oleh Dharmono Hardjowidjono Yogyakarta : Gajah Mada University Press.

Soekanto, Soerjono. 1992. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta : Rajawali.

Suryaningrat, Bayu. 1986. *Sejarah Pemerintahan di Indonesia Babak Hindia Belanda dan Jepang*. Jakarta : Dewa Ruci Press.

Widja, I Gde. 1986. *Sejarah Lokal Suatu Perspektif Dalam Pengajaran Sejarah*. Bandung : Angkasa.

B. Disertasi dan Dokumen

Mattulada. 1975. "Latoa Suatu Lukisan Deskriptif-Analitis Terhadap Antropologi Politik Orang Bugis". Disertasi Fakultas Sastra Universitas Indonesia.

ANRI Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan. Koleksi Arsip Pemerintah Propinsi Sulawesi (1950-1960). No. Reg. 162 dan 209.

Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4 Tahun 1957.

Memori DPRD Tingkat II Soppeng, periode 1987-1992.

Memori Haji Andi Made AliE (Bupati Kepala Daerah Tingkat II Soppeng tahun 1965-1979).

C. Majalah dan Surat Kabar

Akhyar. 1996. "Soppeng Pusat Sutera Alam di KTI".
Majalah Mingguan Berita Semangat Baru. No. 047.

Soemardy, Moh. "Delapan 'Nakhoda' di Usia ke-39
Kabupaten Soppeng". Harian Pedoman Rakyat.
Tanggal 13 Maret 1996 (No. 13 Tahun ke-50).